

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Dasar dan Implementasi

Dr. Hary Priyanto, S.T., M.Si.



PERSEMBAHAN

Untuk Kedua Putraku:

**Semilir Angin Nusantara
&
Gemicik Air Bening Indonesia**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, modul yang berjudul “Analisis Kebijakan Publik” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Modul ini dirancang khusus untuk mahasiswa jurusan Administrasi Publik, dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam dan aplikatif mengenai konsep, proses, serta implementasi analisis kebijakan publik.

Analisis kebijakan publik merupakan salah satu bidang studi yang krusial dalam dunia administrasi publik. Oleh karena itu, modul ini disusun dengan pendekatan yang berbeda, yang tidak hanya menyajikan materi teoritis, tetapi juga mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif melalui berbagai kegiatan interaktif, simulasi kebijakan, dan latihan analisis. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, sehingga mereka dapat lebih memahami kompleksitas dan dinamika dalam melakukan analisis kebijakan publik.

Kami berharap, modul ini tidak hanya menjadi bahan ajar yang informatif, tetapi juga menjadi alat bantu yang efektif dalam mengembangkan kemampuan analitis, kritis, dan strategis mahasiswa dalam memahami serta merespons berbagai isu kebijakan publik. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks nyata, baik di lingkungan akademik maupun profesional.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini, baik berupa saran, dukungan teknis, maupun bantuan lainnya. Kami juga menyadari bahwa modul ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca dan pengguna modul ini untuk perbaikan di masa depan.

Akhir kata, semoga modul ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka di bidang kebijakan publik. Selamat belajar, semoga sukses dalam menempuh studi Anda.

Hormat kami,

Penulis

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1

PENDAHULUAN

Modul ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan aplikatif, memungkinkan Anda untuk belajar melalui keterlibatan aktif dan penerapan praktis.

2

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul “Kebijakan Publik”, mahasiswa diharapkan memahami konsep kebijakan publik, menganalisis prosesnya, dan menerapkan teori dalam evaluasi kebijakan dan mampu merancang proyek kebijakan, mengatasi tantangan implementasi, dan berkomunikasi secara efektif dalam menyampaikan rekomendasi kebijakan.

3

METODE

Modul kebijakan publik mencakup tujuan pembelajaran, materi teks dengan ilustrasi, dan metode proyek. Mahasiswa diharapkan menyelesaikan proyek untuk menerapkan dan memahami solusi terhadap isu kebijakan.

4

KOMPONEN

a. Navigasi

Gunakan menu daftar isi untuk menemukan topik atau materi tertentu dalam modul.

b. Interaksi

Tonton video yang disediakan untuk mendapatkan penjelasan dan contoh praktis dan kerjakan proyek atau latihan yang disediakan untuk menerapkan pengetahuan secara langsung.

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	I
KATA PENGANTAR	II
PETUNJUK PENGGUNAAN	IV
DAFTAR ISI	VI
BAB 1 KEBIJAKAN PUBLIK.....	1
BAB 2 MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK.....	14
BAB 3 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK	20
BAB 4 MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.....	29
BAB 5 DAMPAK ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK	35
BAB 6 ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK	48
BAB 7 ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK.....	56
BAB 8 ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK	64
BAB 9 ANALISIS MONITORING IMPLEMENTASI KEBIJAKA PUBLIK	71
BAB 10 ANALISIS EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK.....	79
BAB 11 NASKAH AKADEMIK KEBIJAKAN PUBLIK	89
DAFTAR PUSTAKA	98
BIOGRAFI.....	99

KEBIJAKAN PUBLIK |

I Kebijakan Publik

Tujuan Pembelajaran

Mampu menjelaskan pengertian kebijakan dan publik.

Studi kebijakan publik memang memiliki cakupan yang sangat luas karena mencakup banyak **bidang dan sektor** yang berbeda seperti **ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum,** dan lain-lain. Ini karena kebijakan publik tidak hanya mencakup keputusan yang dibuat oleh **pemerintah pusat,** tetapi juga oleh **pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan bahkan sektor swasta.**

Secara umum, "kebijakan publik" merujuk pada keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk **menyelesaikan atau mengatasi masalah atau isu tertentu** yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Di sini, "kebijakan" mengacu pada serangkaian langkah konkret, aturan, atau program yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat.

Sementara itu, "publik" dalam konteks kebijakan publik merujuk pada masyarakat umum atau warga negara secara keseluruhan, atau segmen masyarakat tertentu yang mungkin terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Kebijakan publik biasanya diadopsi untuk menjawab atau mengatasi kebutuhan, masalah, atau aspirasi yang muncul dari masyarakat atau yang dianggap penting bagi kepentingan umum.

A | Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan publik adalah untuk **memecahkan masalah-masalah umum** yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Terlalu banyak masalah, perbedaan, dan keparahan. Oleh karena itu, **tidak semua masalah publik dapat menghasilkan kebijakan publik.**

Hanya masalah publik yang membuat orang berpikir dan mencari solusi yang dapat menghasilkan kebijakan publik (hanya yang memotivasi orang untuk bertindak menjadi masalah politik).

Oleh karena itu, perumusan masalah kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Namun dalam proses kebijakan publik perlu diperhatikan siapa yang berhak merumuskan, menetapkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kinerja kebijakan publik.

Suatu kebijakan akan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. Selain itu, kebijakan merupakan solusi dari permasalahan yang muncul di masyarakat. Kebijakan bertujuan untuk **memecahkan masalah yang ada secara keseluruhan, bukan untuk memecahkan masalah dengan menciptakan yang baru.**



Namun dengan kebijakan ini, permasalahan yang ada dapat teratasi dan menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Kebijakan publik dapat dilihat dari alternatif-alternatif yang dibuat dalam kebijakan tersebut.

Dalam kebijakan publik terdapat banyak alternatif pilihan, sehingga pilihan kebijakan merupakan kebijakan yang terbaik diantara alternatif-alternatif lainnya. Atau lebih baik dari yang lebih baik.

Kebijakan akan menjadi acuan utama bagi anggota organisasi atau masyarakat untuk bertindak. Kebijakan dapat mengikat rakyat pada tingkat strategis atau direncanakan oleh otoritas publik. Sebagai **keputusan yang mengikat masyarakat (publik)**, kebijakan harus **dibuat oleh otoritas politik**, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau rakyat, umumnya melalui proses pemilu untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Contoh kebijakan publik adalah :

1. Undang-undang
2. Peraturan pemerintah
3. Keputusan presiden
4. Keputusan menteri
5. Peraturan daerah
6. Keputusan wali
7. Keputusan direktur

Namun pada kenyataannya, setiap kebijakan **mengandung lebih dari satu tujuan** yang disebutkan di atas, pada tingkat yang berbeda. Dengan demikian kebijakan publik selalu **mengandung fungsi ganda** yaitu **membuat kebijakan adil dan seimbang** dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah **keputusan penguasa negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama**.

B | Ciri-ciri Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan publik merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menangani masalah-masalah masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perumusan kebijakan publik, termasuk:

1. Identifikasi Masalah

Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Ini melibatkan analisis mendalam tentang akar penyebab masalah dan dampaknya terhadap masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat

Penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Ini dapat dilakukan melalui diskusi publik, forum terbuka, atau konsultasi dengan para pemangku kepentingan.

3. Penelitian dan Analisis

Perumusan kebijakan memerlukan penelitian dan analisis yang cermat tentang berbagai solusi yang mungkin dan dampaknya terhadap masyarakat.

4. Kehandalan Data

Penting untuk menggunakan data yang akurat dan dapat dipercaya dalam proses perumusan kebijakan. Data yang tidak tepat dapat mengarah pada kebijakan yang tidak efektif atau bahkan merugikan.

5. Partisipasi Stakeholder

Selain masyarakat umum, perumusan kebijakan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Keterlibatan mereka penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Proses perumusan kebijakan harus transparan dan akuntabel. Ini berarti bahwa orang harus tahu bagaimana keputusan dibuat dan siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.

Suharno (2010) memberikan beberapa ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan **tindakan yang mengarah pada tujuan** daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Ini berarti kebijakan publik biasanya **direncanakan dengan tujuan tertentu**. Mereka tidak terjadi secara kebetulan atau acak, tetapi merupakan hasil dari proses perencanaan yang cermat.
- b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas **tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola** yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

Kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, tetapi juga termasuk keputusan terkait dengan implementasi dan pemberlakuan kebijakan tersebut.

- c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu. Ini menunjukkan bahwa kebijakan publik terkait langsung dengan tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- d) Kebijakan publik dapat berbentuk positif atau negatif, termasuk keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah diperlukan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya tentang melakukan sesuatu, tetapi juga tentang ketidakpartisipasi atau tidak melakukan tindakan dalam beberapa kasus.

Ciri-ciri ini membantu untuk memahami sifat dan karakteristik khusus dari kebijakan publik, yang seringkali melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang kompleks.

| Prosedur pembuatan kebijakan publik

Pembuatan kebijakan publik melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan terstruktur. Berikut adalah prosedur umum dalam pembuatan kebijakan publik:

1. Identifikasi Masalah

Tahap awal adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang memerlukan perhatian dan intervensi pemerintah. Ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti penelitian, laporan media, atau umpan balik dari masyarakat.

2. Analisis Kebutuhan dan Dampak

Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan yang ada dan memperkirakan dampak dari berbagai opsi kebijakan yang mungkin.

3. Pengumpulan Data dan Informasi

Mengumpulkan data dan informasi terkait masalah yang akan diselesaikan, termasuk studi ilmiah, data statistik, dan pandangan pemangku kepentingan (stakeholders).

4. Stakeholder Engagement

Melibatkan pemangku kepentingan yang relevan seperti masyarakat umum, lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, dan akademisi dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terwakili dan dipertimbangkan.

5. Pengembangan Opsi Kebijakan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, menyusun berbagai opsi kebijakan yang dapat diambil untuk menanggapi masalah yang diidentifikasi. Setiap opsi harus dievaluasi berdasarkan keefektifan, keadilan, kelayakan politik, dan faktor-faktor lainnya.

6. Evaluasi Opsi Kebijakan

Mengevaluasi setiap opsi kebijakan yang telah disusun, termasuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dan dampak yang mungkin timbul.

7. Pengambilan Keputusan

Berdasarkan evaluasi opsi kebijakan, pemangku kepentingan yang relevan dan pembuat keputusan membuat keputusan tentang kebijakan mana yang akan diadopsi.

8. Pengembangan Kebijakan

Setelah keputusan diambil, langkah selanjutnya adalah merancang secara rinci kebijakan yang akan diimplementasikan, termasuk penyusunan peraturan, pedoman, atau instruksi yang diperlukan.

9. Implementasi

Kebijakan yang telah dirancang diimplementasikan oleh lembaga atau badan yang bertanggung jawab. Ini melibatkan alokasi sumber daya, pelatihan personel, dan komunikasi efektif kepada masyarakat.

10. Evaluasi dan Penyesuaian

Kebijakan dievaluasi secara berkala untuk menilai keefektifan dan keberlanjutannya. Jika diperlukan, kebijakan dapat disesuaikan atau direvisi berdasarkan hasil evaluasi ini.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah salah satu **elemen penting dalam mewujudkan terwujudnya suatu gagasan**. Seseorang atau pelaku pemerintahan harus menerapkan atau mengimplementasikan suatu ide agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan.

Implementasi merupakan proses yang ditempuh atau dilaksanakan diberbagai bidang **tanpa adanya batasan apapun**. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan suatu program, maka perlu adanya kesiapan atas semua keperluan dilapangan.

Implementasi sering diremehkan, dianggap hanya pelaksanaan dari program-program yang telah ditetapkan oleh para pembuat keputusan, seolaholah tahapan ini kurang berpengaruh. Implementasi kebijakan dianggap penting dan harus dilakukan.

Seperti yang kita ketahui kebijakan tidak akan memberikan dampak apapun tanpa adanya penerapan atau pelaksanaan. Kebijakan hanya sebagai dokumen atau program yang tidak bermakna bagi kehidupan. Suatu kebijakan yang dinilai baik dan tepat pun **tidak akan memberikan perubahan apapun bila tidak diimplementasikan**.

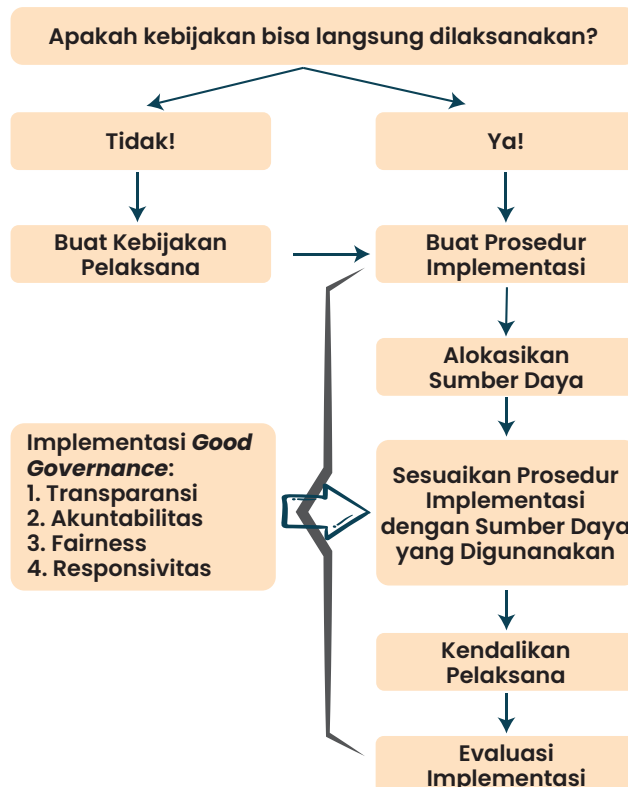
Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah **aktivitas dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan**. Implementasi suatu kebijakan memiliki peranan yang penting bagi jalannya proses pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

No	Tahap	Isu Penting
1	Implementasi Strategi (Pra Implementasi)	1. Menyesuaikan struktur dengan strategi 2. Melembagakan strategi 3. Mengoperasionalkan strategi 4. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi
2	Pengorganisasian (Organizing)	1. Design organisasi dan struktur organisasi 2. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan 3. Integrasi dan koordinasi 4. Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia (recruiting & staffing) 5. Hak, wewenang, dan kewajiban 6. Pendelegasian (Sentralisasi dan desentralisasi) 7. Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM
3	Penggerakan dan kepemimpinan	1. Efektivitas kepemimpinan 2. Motivasi 3. Etika 4. Mutu 5. Kerja sama tim 6. Komunikasi Organisasi 7. Negoisasi
4	Pengendalian	1. Desain pengendalian 2. Sistem informasi manajemen 3. Pengendalian anggaran/keuangan 4. Audit

Dari tabel diatas terdapat tahapan serta rincian aktivitas dalam mengimplementasikan kebijakan. Karena peranan yang penting, implementasi kebijakan bila tidak dilakukan sesuai dengan proses yang tepat, maka hasil dari rencana kebijakan dapat berbeda dari apa yang sebenarnya diinginkan, baik oleh pembuat kebijakan itu sendiri atau oleh orang-orang yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Dalam hal ini, misalnya, implementasi kebijakan dilakukan dengan benar sesuai SOP dan memanfaatkan uang sesuai dengan yang diperlukan tanpa melakukan tindakan kecurangan (korupsi) namun belum tentu hasil dari kebijakan tersebut dapat bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat umum yang secara formal sebagai sasaran atau target kebijakan. (Kartawidjaja, 2018).

Meski demikian, untuk menyederhanakan tahapan tersebut, ada panduan yang diperlukan untuk melakukan implementasi kebijakan dengan model sebagai berikut (Dwiowiyoto, 2003):



Tahapan pelaksanaan kebijakan tersebut adalah: Fase penting karena fase ini ditentukan Kebijakan yang berhasil. Fase implementasi diperlukan rangkaian tindakan yang dilakukan adalah transformasi ekspresi yang ditentukan kebijakan tersebut pada akhirnya akan menjadi pola operasional lakukan perubahan sesuai kebutuhan Dengan kebijakan yang telah ditandatangani sebelumnya. Kunci implementasinya adalah memahami apa yang perlu Anda lakukan Ini akan dilaksanakan setelah kebijakan diadopsi.

E | Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses penting untuk **menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan. Tujuannya adalah** untuk memahami apakah kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan, apakah ada perubahan yang dihasilkan, dan bagaimana proses pelaksanaannya.

Berikut adalah beberapa langkah umum dalam proses evaluasi kebijakan publik:

1. Penetapan Kriteria Evaluasi

Tahap awal dalam evaluasi kebijakan adalah menentukan kriteria atau standar yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan. Ini bisa mencakup aspek-aspek seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, dan dampak sosial atau lingkungan.

2. Pengumpulan Data

Data yang relevan harus dikumpulkan untuk mengevaluasi kebijakan. Ini bisa mencakup data kuantitatif (misalnya statistik, angka, dan indikator kinerja) dan data kualitatif (misalnya pendapat pemangku kepentingan, studi kasus, atau wawancara).

3. Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memahami hasil dan dampak kebijakan.

Ini melibatkan penggunaan teknik analisis statistik dan metode kualitatif untuk menginterpretasikan temuan.

4. Penilaian Terhadap Kriteria Evaluasi:

Data dan temuan dari analisis dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Ini membantu dalam menilai apakah kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan dan sejauh mana keberhasilannya.

5. Identifikasi Pelajaran dan Rekomendasi

Evaluasi kebijakan harus mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipelajari dari implementasi kebijakan tersebut. Ini mencakup mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menyarankan perbaikan atau perubahan untuk kebijakan di masa depan.

6. Pelaporan dan Komunikasi Hasil:

Hasil evaluasi kebijakan harus dilaporkan secara transparan kepada pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pembuat kebijakan, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Komunikasi yang efektif tentang hasil evaluasi dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan mendukung pembuatan keputusan yang lebih baik di masa depan.

7. Implementasi Perubahan

Jika direkomendasikan, perubahan atau penyesuaian harus diimplementasikan dalam kebijakan atau program yang ada. Ini memastikan bahwa hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kinerja kebijakan secara keseluruhan.

Evaluasi kebijakan publik bukanlah proses sekali jalan, melainkan sebuah siklus yang berkelanjutan. Evaluasi yang berulang secara teratur diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perubahan konteks, kebutuhan, dan prioritas masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mari kita simak video penjelasan mengenai **Kebijakan Publik** dengan scan QR Code di samping atau dengan klik video di bawah ini!



SCAN ME



PROJECT

Setelah mengetahui pengertian kebijakan publik, identifikasi langkah-langkah merancang kebijakan publik untuk mengurangi tingkat pengangguran pemuda di sebuah kota di Indonesia!

MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK

I Masalah Kebijakan Publik

Tujuan Pembelajaran

Mampu menjelaskan perbedaan masalah publik dan masalah kebijakan

A | Masalah Publik

Masalah publik adalah kondisi atau **situasi yang mempengaruhi masyarakat** secara luas dan seringkali membutuhkan intervensi atau tanggapan dari pemerintah atau lembaga publik. Masalah publik biasanya mencakup **isu-isu yang bersifat kompleks dan memiliki dampak yang signifikan** terhadap kesejahteraan masyarakat, ekonomi, lingkungan, atau stabilitas sosial.

Ada berbagai jenis masalah publik, dan mereka dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan suatu negara. Beberapa contoh masalah publik yang umum meliputi:

1. **Kemiskinan:** Ketidakmampuan sebagian besar individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan.
2. **Kesehatan Masyarakat:** Termasuk isu-isu seperti penyakit menular, akses terhadap layanan kesehatan, kesehatan mental, dan kebijakan kesehatan publik.
3. **Pendidikan:** Meliputi akses terhadap pendidikan berkualitas, kesenjangan dalam kualitas pendidikan, dan tantangan dalam meningkatkan hasil belajar siswa.
4. **Perubahan Iklim:** Termasuk dampak perubahan iklim seperti kenaikan suhu global, cuaca ekstrem, dan peningkatan tingkat laut.
5. **Ketimpangan Ekonomi:** Kesenjangan antara kelompok-kelompok dalam distribusi kekayaan, pendapatan, dan akses terhadap kesempatan ekonomi.

6. **Kriminalitas dan Keamanan:** Tingkat kejahatan, kekerasan, dan ketidakamanan dalam masyarakat, serta tantangan dalam pencegahan dan penegakan hukum.
7. **Ketidaksetaraan Gender:** Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan politik.
8. **Krisis Kemanusiaan:** Krisis yang melibatkan pengungsi, konflik bersenjata, bencana alam, dan krisis kemanusiaan lainnya yang membutuhkan tanggapan cepat dan bantuan internasional.

Masalah publik sering kali menjadi fokus perhatian pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum dalam upaya untuk menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

B | Masalah Kebijakan

Masalah kebijakan publik adalah **ketidaksempurnaan, tantangan, atau kebutuhan yang mendorong perumusan, implementasi, atau evaluasi kebijakan** oleh pemerintah atau lembaga publik. Masalah kebijakan dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk perubahan dalam kondisi sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan, serta dari kebutuhan masyarakat atau isu-isu yang berkembang.

Beberapa contoh masalah kebijakan publik meliputi:

1. **Ketidaksetaraan Ekonomi:** Ketimpangan dalam pendapatan, kekayaan, atau akses terhadap kesempatan ekonomi yang menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.
2. **Perubahan Iklim:** Dampak perubahan iklim seperti kenaikan suhu global, cuaca ekstrem, dan kerusakan lingkungan yang memerlukan kebijakan untuk mitigasi dan adaptasi.

3. **Kesehatan Masyarakat:** Isu-isu kesehatan seperti penyebaran penyakit menular, krisis kesehatan mental, dan akses terhadap layanan kesehatan yang membutuhkan kebijakan untuk pencegahan, perlindungan, dan pemulihan.
4. **Pendidikan:** Tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi kesenjangan pendidikan, dan memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam.
5. **Ketidakamanan dan Kriminalitas:** Tingkat kejahatan, kekerasan, dan ketidakamanan yang memerlukan kebijakan untuk penegakan hukum, pencegahan kejahatan, dan pemulihan korban.
6. **Ketidaksetaraan Gender:** Masalah diskriminasi gender, akses terhadap pekerjaan dan pendidikan, serta kekerasan terhadap perempuan yang memerlukan kebijakan untuk mencapai kesetaraan gender.
7. **Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial:** Tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, menyediakan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan, dan memastikan kesejahteraan sosial yang layak bagi semua warga.

Masalah kebijakan publik sering kali kompleks dan saling terkait, dan sering kali membutuhkan **pendekatan lintas-sektoral dan solusi yang komprehensif**. Pemerintah dan lembaga publik perlu merumuskan kebijakan yang responsif, inovatif, dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah-masalah ini demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Masalah publik dan masalah kebijakan publik adalah dua konsep yang berbeda, meskipun sering kali terkait satu sama lain dalam konteks proses pembuatan kebijakan.

Berikut adalah perbedaan antara masalah publik dengan kebijakan publik:

a. Masalah Publik

- 1) Merujuk pada kondisi atau situasi yang mempengaruhi masyarakat secara luas atau signifikan.
- 2) Masalah publik bisa berupa berbagai isu sosial, ekonomi, politik, lingkungan, atau kesejahteraan yang menjadi perhatian masyarakat atau memiliki dampak yang signifikan.

Contoh masalah publik meliputi kemiskinan, perubahan iklim, ketidaksetaraan gender, kesehatan masyarakat, dan ketimpangan ekonomi.

b. Masalah Kebijakan Publik

- 1) Merujuk pada ketidaksempurnaan, tantangan, atau kebutuhan yang mendorong perumusan, implementasi, atau evaluasi kebijakan oleh pemerintah atau lembaga publik.
- 2) Masalah kebijakan publik sering kali muncul sebagai respons terhadap masalah publik yang telah diidentifikasi.
- 3) Ini adalah masalah atau dilema tertentu yang menjadi fokus pembuat kebijakan dalam upaya untuk menemukan solusi atau tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah publik.

Contoh masalah kebijakan publik termasuk penentuan kebijakan fiskal untuk mengatasi kemiskinan, pengembangan kebijakan energi untuk mengatasi perubahan iklim, atau pembentukan kebijakan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan.

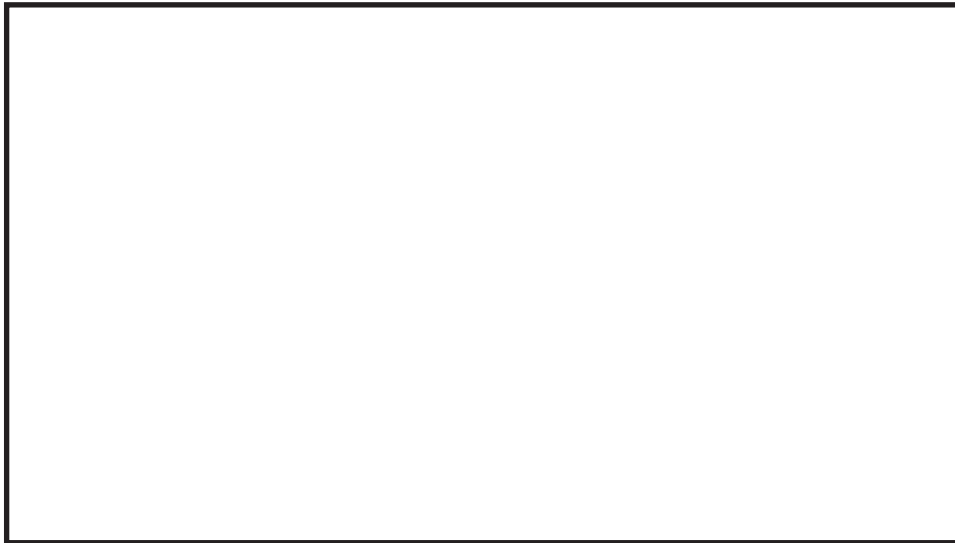
Dengan demikian, meskipun masalah publik dan masalah kebijakan publik sering kali terkait dan saling mempengaruhi, mereka merupakan konsep yang berbeda.

Masalah publik mengacu pada **kondisi atau isu-isu yang mempengaruhi masyarakat** secara luas, sementara masalah kebijakan publik berkaitan dengan **upaya untuk merumuskan kebijakan** yang bertujuan mengatasi masalah-masalah tersebut.

Untuk lebih jelasnya mari kita simak video penjelasan mengenai **Masalah Kebijakan Publik** dengan scan QR Code di samping atau dengan klik video di bawah ini!



SCAN ME



PROJECT

Silahkan kamu cari satu contoh kasus kebijakan publik lalu identifikasi dan jelaskan masalah publik yang dihadapi!

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

| Analisis Kebijakan Publik

Tujuan Pembelajaran

Mampu menjelaskan analisis kebijakan publik.

A | Tujuan Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik adalah **proses ilmiah** dengan tujuan **mengkasi, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap suatu kebijakan publik** yang telah atau akan diambil oleh pemerintah maupun aktor yang berpengaruh.

Analisis kebijakan publik menjadi penolong para pembuat keputusan agar dapat mendapatkan alternatif kebijakan yang efektif, efisien, dan adil untuk mengatasi masalah publik.

Analisis kebijakan publik memiliki beberapa tujuan, anatar lain:

1. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah publik yang memerlukan intervensi kebijakan.
2. Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi yang relevan dengan masalah publik dan kebijakan yang ada atau potensial.
3. Mengembangkan dan membandingkan alternatif kebijakan yang berbeda dalam hal dampak, biaya, manfaat, risiko, dan kelayakan.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada kriteria analisis yang objektif dan rasional.
5. Mengkomunikasikan hasil analisis kebijakan kepada para pemangku kepentingan dan publik dengan cara yang jelas, ringkas, dan persuasif.

Analisis kebijakan publik dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada konteks, tujuan, sumber yang tersedia. Tetapi, kebijakan publik dapat dibagi menjadi enam tahapan, yaitu:

1. Tahap 1

Mendefinisikan masalah publik. Tahap ini meliputi identifikasi masalah publik yang ingin diselesaikan, penyebab dan akibatnya, serta batasan dan asumsi yang berkaitan dengan masalah tersebut.

2. Tahap 2

Menentukan kriteria evaluasi. Tahap ini meliputi penetapan kriteria yang akan digunakan untuk menilai alternatif kebijakan, seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, keterlaksanaan, dan keterimaan.

3. Tahap 3

Mengidentifikasi alternatif kebijakan. Tahap ini meliputi pencarian dan pengembangan alternatif kebijakan yang berpotensi untuk menyelesaikan masalah publik, baik yang bersifat inkremental maupun radikal.

4. Tahap 4

Mengevaluasi alternatif kebijakan. Tahap ini meliputi analisis dampak, biaya, manfaat, risiko, dan kelayakan dari setiap alternatif kebijakan, serta perbandingannya dengan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan.

5. Tahap 5

Merekomendasikan kebijakan terbaik. Tahap ini meliputi pemilihan alternatif kebijakan yang paling sesuai dengan kriteria evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang berisi alasan, sasaran, strategi, dan indikator keberhasilan dari kebijakan yang dipilih.

6. Tahap 6

Mengkomunikasikan hasil analisis kebijakan. Tahap ini meliputi penyajian hasil analisis kebijakan dalam bentuk laporan, presentasi, atau media lain yang sesuai dengan audiens dan tujuan komunikasi, serta mempertimbangkan aspek etika, politik, dan sosial dari analisis kebijakan.

B | Ruang Lingkup Analisis Kebijakan Publik

Ruang lingkup kebijakan publik mencakup banyak bidang atau luas diberbagai sektor bahkan sampai bidang pembangunan. Contohnya, kebijakan publik bidang kesehatan, transportasi, pendidikan dan bidang lainnya. Beberapa ruang lingkup dari kebijakan publik di antaranya sebagai berikut:

1. **Penelitian terkait perilaku birokrasi dan elite politik** yang berkaitan dengan kebijakan politik yang sering dipengaruhi oleh bagaimana birokrasi dan elite politik berinteraksi dan mengambil keputusan.
2. **Peran kelompok berkepentingan di dalam proses kebijakan**, biasanya berkaitan dengan kepentingan dari masyarakat. Kelompok berkepentingan memiliki peran signifikan dalam proses kebijakan publik. Mereka dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan, baik melalui advokasi, lobbying, atau partisipasi langsung dalam proses keputusan.
3. **Shared concern dan shared problems yang terjadi di antara para aktor politik**, khususnya yang terlibat dalam proses pembuatan, implementasi hingga adanya evaluasi. Kebijakan publik ini berusaha menyelesaikan masalah atau perhatian bersama yang dihadapi masyarakat atau kelompok tertentu mencakup masalah seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim dan lain sebagainya.

Selain itu, ruang lingkup kebijakan publik juga meliputi :

1. **Analisis kebutuhan masyarakat**, penelitian dan analisis untuk memahami kebutuhan masyarakat yang akan diakomodasi oleh kebijakan publik.
2. **Proses pembuatan kebijakan**, tahapan pembuatan kebijakan mulai dari perumusan ide, penyusunan rancangan kebijakan, hingga pengambilan keputusan.

3. **Implementasi kebijakan**, pelaksanaan kebijakan dalam masyarakat, termasuk koordinasi antar instansi, monitoring dan alokasi sumber daya.
4. **Evaluasi kebijakan**, penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah diterapkan, lalu mengidentifikasi perubahan atau penyesuaian yang diperlukan.

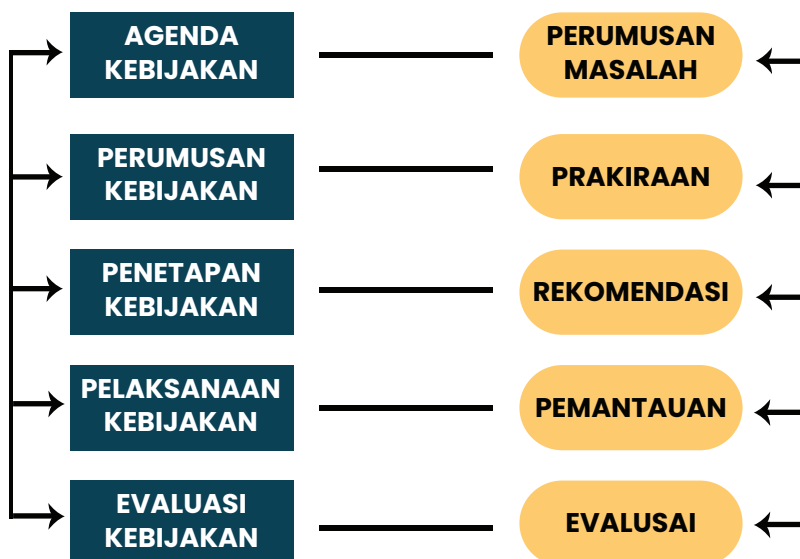
Prosedur Analisis Kebijakan Publik

Prosedur kebijakan baru dimulai ketika para pelaku kebijakan mulai sadar bahwa adanya **situasi permasalahan**, yaitu situasi yang dirasakan adanya kesulitan atau kekecewaan dalam perumusan kebutuhan, nilai dan kesempatan menurut Ackoff dalam Dunn (2000:121).

Dunn (2000-21) berpendapat bahwa **metodologi analisis kebijakan** menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia: **definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi**.

Dalam analisis kebijakan prosedur-prosedur tersebut memperoleh nama-nama khusus, yakni:

Analisis Kebijakan Publik



1. Perumusan masalah

Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.

2. Peramalan

Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan.

3. Rekomendasi

Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah.

4. Pemantauan

Pemantauan (deskripsi), menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.

5. Evaluasi

Evaluasi, yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.

Dalam analisis kebijakan publik paling tidak meliputi tujuh langkah dasar. Ke tujuh langkah tersebut adalah:

1. Formulasi masalah kebijakan

Formulasi Masalah Kebijakan untuk dapat mengkaji sesuatu masalah publik diperlukan **teori, informasi dan metodologi** yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Sehingga identifikasi masalah akan tepat dan akurat, selanjutnya dikembangkan menjadi policy question yang diangkat dari policy issues tertentu.

Teori dan metode yang diperlukan dalam tahapan ini adalah metode penelitian termasuk evaluation research,

metode kuantitatif, dan teori-teori yang relevan dengan substanti persoalan yang dihadapi, serta informasi mengenai permasalahan yang sedang dilakukan studi.

2. Formulasi tujuan

Suatu kebijakan selalu mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah publik. Analisis kebijakan harus dapat merumuskan tujuan-tujuan tersebut secara jelas, realistis dan terukur. Jelas, maksudnya mudah dipahami, realistis maksudnya sesuai dengan nilai-nilai filsafat dan terukur maksudnya sejauh mungkin bisa diperhitungkan secara nyata, atau dapat diuraikan menurut ukuran atau satuan-satuan tertentu.

3. Penentuan kriteria

Analisis memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif. Hal yang sifatnya pragmatis memang diperlukan seperti ekonomi (efisiensi), politik (konsensus antar stakeholders, administratif (kemungkinan efektivitas namun tidak kalah penting juga hal-hal yang menyangkut nilai-nilai abstrak yang fundamental seperti etika dan falsafah (equity, equality).

4. Penyusunan model

Model adalah abstraksi dari dunia nyata, dapat pula didefinisikan sebagai gambaran sederhana dari realitas permasalahan yang kompleks sifatnya. Model dapat dituangkan dalam berbagai bentuk yang kompleks sifatnya.

Model dapat dituangkan dalam berbagai bentuk yang dapat digolongkan sebagai berikut: Skematik model (contoh: flow chart), fisikal model (contoh: miniatur), game model (contoh: latihan pemadam kebakaran), simbolik model (contoh: rumus matematik). Manfaat model dalam analisis kebijakan publik adalah mempermudah deskripsi persoalan secara struktural, membantu dalam melakukan prediksi akibat-akibat yang timbul dari ada atau tidaknya perubahan-perubahan dalam faktor penyebab.

5. Pengembangan alternatif

Alternatif adalah sejumlah alat atau cara-cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan, langsung ataupun tak langsung sejumlah tujuan yang telah ditentukan.

Alternatif-alternatif kebijakan dapat muncul dalam pikiran seseorang karena beberapa hal:

1. Berdasarkan pengamatan terhadap kebijakan yang telah ada.
2. Dengan melakukan semacam analogi dari suatu kebijakan dalam sesuatu bidang dan dicoba menerapkannya dalam bidang yang tengah dikaji.
3. merupakan hasil pengkajian dari persoalan tertentu.

6. Penilaian alternatif

Alternatif-alternatif yang ada perlu dinilai berdasarkan kriteria sebagaimana yang dimaksud pada langkah ketiga. Tujuan penilaian adalah mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan fisibilitas setiap alternatif dalam pencapaian tujuan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai alternatif mana yang paling layak, efektif dan efisien.

Perlu juga menjadi perhatian bahwa, mungkin suatu alternatif secara ekonomis menguntungkan, secara administrasi bisa dilaksanakan tetapi bertentangan dengan nilai-nilai sosial atau bahkan mempunyai dampak negatif kepada lingkungan. Maka untuk gejala seperti ini perlu penilaian etika dan falsafah atau pertimbangan lainnya yang mungkin diperlukan untuk bisa menilai secara lebih obyektif.

7. Rekomendasi kebijakan

Penilaian atas alternatif-alternatif akan memberikan gambaran tentang sebuah pilihan alternatif yang tepat untuk mencapai tujuan-kebijakan publik. Tugas analisis kebijakan publik pada langkah terakhir ini adalah merumuskan rekomendasi mengenai alternatif yang

yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan secara optimum. Rekomendasi dapat satu atau beberapa alternatif, dengan argumentasi yang lengkap dari berbagai faktor penilaian tersebut. Dalam rekomendasi ini sebaiknya dikemukakan strategi pelaksanaan dari alternatif kebijakan yang disodorkan kepada pembuat kebijakan publik.

Untuk lebih jelasnya mari kita simak video penjelasan mengenai **Analisis Kebijakan Publik** dengan scan QR Code di samping atau dengan klik video di bawah ini!



SCAN ME



PROJECT

Mengapa diperlukan analisis kebijakan publik oleh pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik?

MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

| Model Analisis Kebijakan Publik

Tujuan Pembelajaran

Mampu menjelaskan model analisis kebijakan publik.

A | Model Analisis Prospektif

Analisis kebijakan prospektif merupakan pendekatan yang digunakan untuk **memprediksi dan mengevaluasi berbagai dampak potensial dari kebijakan** sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Pendekatan ini bertujuan untuk **memberikan gambaran yang lebih komprehensif** tentang konsekuensi dari berbagai alternatif kebijakan, sehingga pengambil keputusan dapat membuat pilihan yang lebih informasi dan rasional.

Tahapan Analisis Model Prospektif Kebijakan Publik:

1. Identifikasi Masalah

- a. Mengidentifikasi isu atau masalah yang membutuhkan intervensi kebijakan
- b. Memahami konteks masalah, termasuk faktor-faktor penyebab dan pihak-pihak yang terlibat.

2. Perumusan Tujuan Dan Sasaran

- a. Menentukan tujuan umum dan spesifik dari kebijakan yang akan diimplementasikan.
- b. Sasaran harus jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART).

3. Pengembangan Alternatif Kebijakan

- a. Mengidentifikasi berbagai alternatif kebijakan yang mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Menggunakan metode brainstorming, konsultasi ahli, dan analisis literatur untuk menghasilkan alternatif yang beragam.

4. Analisis Dampak Alternatif Kebijakan

- a. Menilai dampak potensial dari masing-masing alternatif kebijakan.
- b. Menggunakan berbagai metode analisis, seperti analisis cost-benefit, analisis cost-effectiveness, dan analisis dampak lingkungan.

5. Evaluasi dan Seleksi Alternatif

- a. Membandingkan alternatif kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Kriteria evaluasi bisa mencakup efisiensi, efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan.

6. Rekomendasi Kebijakan

- a. Merekomendasikan alternatif kebijakan yang paling sesuai berdasarkan hasil evaluasi.
- b. Menyusun laporan kebijakan yang mencakup justifikasi untuk pilihan yang direkomendasikan.

7. Implementasi dan Pemantauan

- a. Menyusun rencana implementasi kebijakan, termasuk langkah-langkah pelaksanaan dan alokasi sumber daya.
- b. Mengembangkan mekanisme pemantauan untuk menilai kinerja kebijakan setelah diimplementasikan.

8. Evaluasi Pasca-Implementasi

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan setelah diterapkan untuk menilai apakah tujuan dan sasaran tercapai.
- b. Mengidentifikasi area untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan di masa depan.

B | Model Analisis Retrospektif

Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil.

Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Model analisis retrospektif dalam kebijakan publik adalah pendekatan untuk mengevaluasi dan memahami kebijakan setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Dengan tujuan utama **menilai efektifitas, efisiensi, dan dampak kebijakan yang telah diterapkan.**

Analisis retrospektif mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analisis, yaitu :

1. Analisis yang berorientasi pada disiplin.

Analisis **menguji teori** yang didasarkan pada teori dan menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi kebijakan. Kelompok analisis ini tidak berusaha mengidentifikasi tujuan dan sasaran mengapa suatu kebijakan dibuat.

2. Analisis yang berorientasi pada masalah.

Analisis ini **menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan.** Kelompok analisis ini kurang menaruh perhatian pada pengembangan dan pengujian teori-teori, namun lebih kepada identifikasi variable-variabel yang dapat dimanipulasi oleh para pembuat kebijakan untuk mengatasi suatu masalah.

3. Analisis yang berorientasi pada aplikasi.

Kelompok analisis ini juga berusaha untuk **menerangkan sebab dan konsekuensi kebijakan dan program publik,**

tetapi tidak melakukan pengembangan dan pengujian teori dasar. Kelompok ini menaruh perhatian pada variabel kebijakan serta melakukan identifikasi tujuan dan sasaran dari para pembuat kebijakan.

Untuk lebih jelasnya mari kita simak video penjelasan mengenai **Model Analisis Kebijakan Publik** dengan scan QR Code di samping atau dengan klik video di bawah ini!



PROJECT

1. Jelaskan bagaimana kombinasi antara analisis prospektif dan retrospektif dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan publik.
2. Pilih sebuah isu kebijakan publik yang saat ini sedang hangat dibicarakan di Indonesia (misalnya, kebijakan pendidikan, kesehatan, atau lingkungan).
3. Lakukan analisis retrospektif untuk mengevaluasi kebijakan dari isu tersebut
4. Melakukan analisis prospektif dari isu tersebut untuk merencanakan kebijakan di masa depan

DAMPAK ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Analisis Monitoring Implementasi Kebijakan Publik

Tujuan Pembelajaran

Mampu menjelaskan dari analisis kebijakan kebijakan publik.

Apa itu dampak analisis kebijakan publik?

Dampak analisis kebijakan publik mengacu pada konsekuensi atau hasil yang dihasilkan dari penerapan dan pelaksanaan kebijakan publik. analisi ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan tertentu mempengaruhi berbagai aspek masyarakat ekonomi, dan lingkungan.



Dampak Analisis Kebijakan Publik

1. Teori Rasional (Rational Choice Theory)

Penjelasan:

Teori Rasional berasumsi bahwa pembuat kebijakan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan utilitas berdasarkan analisis biaya-manfaat.

Dampak Analisis Kebijakan:

- a. **Efisiensi:** Kebijakan yang dirancang dengan analisis rasional cenderung lebih efisien karena mempertimbangkan pengeluaran dan manfaat secara komprehensif.
- b. **Optimalisasi Sumber Daya:** Kebijakan ini memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.
- c. **Keterbatasan Informasi:** Dampak negatif bisa terjadi jika ada keterbatasan informasi atau data yang tidak lengkap, yang dapat mengarah pada keputusan yang kurang optimal.

2. Teori Incremental (Incrementalism)

Penjelasan:

Teori ini menyatakan bahwa kebijakan publik berkembang melalui perubahan kecil dan bertahap, bukan melalui perubahan besar yang revolusioner.

Dampak Analisis Kebijakan:

- a. **Realistis dan Praktis:** Pendekatan ini seringkali lebih realistis dan praktis karena memungkinkan penyesuaian kecil berdasarkan umpan balik dari implementasi kebijakan sebelumnya.
- b. **Minim Risiko:** Mengurangi risiko besar yang mungkin terjadi jika perubahan yang dilakukan terlalu radikal.
- c. **Keterbatasan Inovasi:** Namun, perubahan bertahap mungkin tidak cukup untuk mengatasi masalah besar yang memerlukan solusi mendasar dan inovatif.

3. Teori Sistem (Systems Theory)

Penjelasan:

Teori ini memandang kebijakan publik sebagai hasil dari interaksi kompleks antara berbagai komponen dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik.

Dampak Analisis Kebijakan:

- a. **Holistik:** Memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait.
- b. **Identifikasi Dampak Tidak Langsung:** Memahami dampak tidak langsung dan interdependensi antara berbagai sektor.
- c. **Kompleksitas:** Namun, pendekatan ini bisa sangat kompleks dan sulit diimplementasikan karena memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai interaksi dalam sistem.

4. Teori Pluralis (Pluralist Theory)

Penjelasan:

Teori ini menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari negosiasi dan kompromi antara berbagai kelompok kepentingan yang bersaing.

Dampak Analisis Kebijakan:

- a. **Demokratis:** Menjamin bahwa berbagai suara dan kepentingan didengar, sehingga kebijakan lebih representatif.
- b. **Kompromi:** Kebijakan yang dihasilkan cenderung merupakan hasil kompromi, yang dapat membuatnya lebih dapat diterima oleh berbagai pihak.
- c. **Dominasi Kelompok Kuat:** Risiko dominasi oleh kelompok yang lebih kuat atau berpengaruh, yang bisa menyebabkan ketidakadilan dan bias dalam kebijakan.

5. Teori Elitis (Elite Theory)

Penjelasan:

Teori ini berpendapat bahwa kebijakan publik terutama dipengaruhi oleh elit yang memiliki kekuasaan dan sumber daya.

Dampak Analisis Kebijakan:

- a. **Keahlian dan Pengalaman:** Kebijakan yang dibuat oleh elit sering kali didasarkan pada keahlian dan pengalaman yang tinggi, yang bisa membuat kebijakan lebih efisien.
- b. **Kurang Representatif:** Pendekatan ini bisa mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat umum, yang dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial.

6. Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory)

Penjelasan:

Teori ini mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi pada analisis kebijakan publik, dengan asumsi bahwa individu dalam sektor publik bertindak berdasarkan kepentingan pribadi.

Dampak Analisis Kebijakan:

- a. **Insentif yang efektif:** Memahami motivasi pribadi di balik keputusan kebijakan dapat membantu merancang insentif yang lebih efektif.
- b. **Skeptisisme terhadap birokrasi:** Pendekatan ini bisa mengarah pada pandangan skeptis terhadap birokrasi dan pembuat kebijakan, yang bisa merusak kepercayaan publik.
- c. **Efisiensi dan korupsi:** Fokus pada efisiensi tetapi juga menunjukkan potensi korupsi dan pengaruh negatif dari kepentingan pribadi dalam pembuatan kebijakan.



Argumen Optimis dan Pesimis

Argumentasi optimis dan pesimis pada analisis kebijakan publik merujuk pada dua pendekatan atau perspektif yang berbeda dalam mengevaluasi potensi dampak dan hasil dari sebuah kebijakan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing perspektif:

Argumen Optimis

Argumentasi optimis memandang kebijakan publik dari sudut pandang positif, dengan asumsi bahwa kebijakan tersebut akan mencapai tujuannya dan menghasilkan dampak yang diinginkan. Pendekatan ini menekankan potensi manfaat dan keberhasilan kebijakan, serta optimisme bahwa hambatan dan tantangan dapat diatasi.

Karakteristik Argumentasi Optimis

- a. Keberhasilan Implementasi: Berkeyakinan bahwa kebijakan akan diimplementasikan dengan baik dan sesuai rencana.
- b. Dampak Positif: Menyoroti manfaat dan hasil positif yang diharapkan dari kebijakan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, atau perbaikan lingkungan.
- c. Solusi Terhadap Tantangan: Berfokus pada solusi dan strategi untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama implementasi kebijakan.
- d. Keberlanjutan dan Skalabilitas: Memiliki keyakinan bahwa kebijakan dapat bertahan lama dan mungkin dapat ditingkatkan skalanya atau diadopsi lebih luas.

Argumen Pesimis

Sebaliknya, argumentasi pesimis memandang kebijakan publik dengan skeptisisme dan menyoroti potensi kegagalan, risiko, dan dampak negatif dari kebijakan tersebut. Pendekatan ini berfokus pada tantangan, kendala, dan kemungkinan bahwa kebijakan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Karakteristik Argumentasi Pesimis

- a. Kegagalan Implementasi: Skeptis bahwa kebijakan akan diimplementasikan dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya. dengan baik dan sesuai rencana.
- b. Dampak Negatif: Menyoroti potensi dampak negatif dan risiko yang mungkin timbul dari kebijakan, seperti kerugian ekonomi, ketidakadilan sosial, atau kerusakan lingkungan.
- c. Tantangan dan Hambatan: Berfokus pada hambatan dan tantangan yang sulit diatasi, seperti masalah anggaran, resistensi masyarakat, atau birokrasi yang lambat.
- d. Keberlanjutan yang Diragukan: Meragukan keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang dari kebijakan.

Bagaimana sudut pandang yang berbeda dapat mempengaruhi pemahaman terhadap dampak kebijakan tersebut?

Mengembangkan argumen pro dan kontra dari kebijakan publik adalah penting untuk memahami dampaknya dari berbagai sudut pandang. Berikut ini adalah beberapa contoh argumen pro dan kontra dari kebijakan publik di beberapa bidang utama: Bagaimana sudut pandang yang berbeda dapat mempengaruhi pemahaman terhadap dampak kebijakan tersebut?

1. Kebijakan Perpajakan Progresif

Pro:

- a. **Redistribusi Kekayaan:** Pajak progresif membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mengalihkan sebagian pendapatan dari kelompok berpenghasilan tinggi ke kelompok berpenghasilan rendah melalui program bantuan sosial.
- b. **Pendapatan Negara:** Pajak progresif meningkatkan pendapatan negara, yang dapat digunakan untuk mendanai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Kontra:

- a. **Disinsentif untuk Bekerja Keras:** Kritikus berpendapat bahwa pajak yang lebih tinggi pada pendapatan tinggi dapat mengurangi insentif untuk bekerja keras atau berinvestasi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
- b. **Pendapatan Negara:** Pajak progresif meningkatkan pendapatan negara, yang dapat digunakan untuk mendanai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

2. Kebijakan Subsidi Energi Terbarukan

Pro:

- a. **Lingkungan yang Lebih Baik:** Subsidi untuk energi terbarukan membantu mengurangi emisi karbon dan polusi, berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim.
- b. **Industri Baru:** Mendukung energi terbarukan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong perkembangan teknologi dalam sektor energi bersih.

Kontra:

- a. **Biaya Tinggi:** Subsidi energi terbarukan bisa sangat mahal dan memerlukan dana besar yang mungkin bisa dialokasikan untuk sektor lain yang juga membutuhkan.
- b. **Kesenjangan Pasar: Intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi dapat** mendistorsi pasar energi dan membuat energi fosil kurang kompetitif, yang bisa mengakibatkan ketidakadilan ekonomi bagi sektor sektor

3. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Pro:

- a. **Pengendalian Pandemi:** Menurunkan laju penularan virus sehingga mengurangi jumlah kasus baru.
- b. **Stabilitas Sistem Kesehatan:** Menurunkan beban rumah sakit dan tenaga kesehatan.
- c. **Kesadaran Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan.

Kontra:

- a. **Ekonomi:** Penutupan dan pembatasan operasional usaha menyebabkan penurunan pendapatan, peningkatan pengangguran, dan kerugian ekonomi.
- b. **Sosial:** Pembatasan sosial dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental.
- c. **Pendidikan:** Penutupan sekolah dan pembelajaran jarak jauh bisa mengakibatkan learning loss dan kesenjangan pendidikan.

4. Kebijakan Pendidikan Gratis

Pro:

- a. **Akses Pendidikan:** Pendidikan gratis meningkatkan akses bagi semua orang, terutama mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, sehingga dapat mengurangi kesenjangan pendidikan.

- b. **Investasi Jangka Panjang:** Pendidikan berkualitas meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja di masa depan, yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kontra:

- a. **Biaya Tinggi:** Menyediakan pendidikan gratis memerlukan anggaran yang besar, yang mungkin mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan pajak atau memotong pengeluaran di sektor lain.
- b. **Efisiensi Penggunaan Dana:** Ada argumen bahwa pendidikan gratis bisa mengurangi efisiensi dan inovasi dalam sistem pendidikan karena kurangnya kompetisi dan insentif finansial.

5. Kebijakan Pengendalian Harga Barang Pokok

Pro:

- a. **Perlindungan Konsumen:** Pengendalian harga dapat melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi dan memastikan bahwa barang-barang pokok tetap terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- b. **Stabilitas Ekonomi:** Menjaga harga barang pokok tetap stabil dapat membantu mengurangi inflasi dan memberikan stabilitas ekonomi.

Kontra:

- a. **Distorsi Pasar:** Pengendalian harga dapat menyebabkan distorsi pasar, seperti kekurangan barang karena produsen mungkin tidak termotivasi untuk memproduksi barang dengan harga yang ditetapkan.
- b. **Subsidi:** Pemerintah mungkin perlu memberikan subsidi untuk menutupi biaya produksi yang lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan, yang bisa membebani anggaran negara.



Analisis Dampak Kebijakan Publik

Analisis dampak kebijakan publik adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi potensial dari suatu kebijakan publik sebelum dan sesudah implementasinya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami efek kebijakan tersebut pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesehatan, serta untuk mengidentifikasi potensi manfaat dan risiko.



Tujuan analisis dampak kebijakan publik

1. **Menilai Efektivitas:** Mengevaluasi apakah kebijakan mencapai tujuan dan sasarannya.
2. **Mengidentifikasi Dampak:** Menganalisis dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan pada berbagai sektor.
3. **Mendeteksi Risiko dan Hambatan:** Mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan.
4. **Meningkatkan Transparansi:** Memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang konsekuensi kebijakan kepada pemangku kepentingan.
Membantu Pengambilan Keputusan: Menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan terinformasi.



Komponen analisis dampak kebijakan publik

1. **Deskripsi Kebijakan:** Penjelasan tentang kebijakan yang dianalisis, termasuk tujuan, lingkup, dan mekanisme implementasi.
2. **Analisis Situasi:** Evaluasi situasi sebelum kebijakan diterapkan, termasuk masalah yang dihadapi dan konteks yang relevan.
3. **Identifikasi Stakeholder:** Menentukan pihak-pihak yang terpengaruh oleh kebijakan.

4. **Metodologi:** Pendekatan dan metode yang digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan, seperti analisis data kuantitatif dan kualitatif, survei, wawancara, atau studi kasus.
5. **Dampak Ekonomi:** Evaluasi efek kebijakan terhadap ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendapatan, dan distribusi kekayaan.
6. **Dampak Sosial:** Analisis dampak kebijakan pada masyarakat, seperti kesejahteraan sosial, ketimpangan, pendidikan, dan kesehatan.
7. **Dampak Lingkungan:** Penilaian efek kebijakan terhadap lingkungan, seperti polusi, konservasi sumber daya alam, dan perubahan iklim.
8. **Dampak Kesehatan:** Evaluasi dampak kebijakan pada kesehatan masyarakat, termasuk akses ke layanan kesehatan, kesehatan, dan kualitas hidup.
9. **Rekomendasi:** Saran untuk meningkatkan kebijakan, mengurangi dampak negatif, dan memaksimalkan manfaat.



Proses analisis dampak kebijakan publik

1. **Identifikasi Masalah dan Tujuan:** Menetapkan masalah yang ingin diatasi oleh kebijakan dan tujuan spesifik yang ingin dicapai.
2. **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data yang relevan untuk memahami situasi saat ini dan memproyeksikan dampak kebijakan.
3. **Analisis Dampak:** Menggunakan berbagai metode untuk menganalisis dampak potensial dari kebijakan pada aspek yang relevan.
4. **Evaluasi Alternatif:** Membandingkan kebijakan dengan alternatif lain nya untuk menentukan pendekatan yang paling efektif.
5. **Pelaporan:** Menyusun laporan yang merangkum temuan analisis dan menyampaikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan.

6. **Monitoring dan Evaluasi:** Mengawasi implementasi kebijakan dan melakukan evaluasi berkelanjutan untuk menilai kinerja dan dampaknya dari waktu ke waktu.

Untuk lebih jelasnya mari kita simak video penjelasan mengenai **Dampak Analisis Kebijakan Publik** dengan scan QR Code di samping atau dengan klik video di bawah ini!



SCAN ME



PROJECT

1. Pilih satu kebijakan lingkungan yang telah diterapkan di Indonesia
2. Analisis dampak kebijakan tersebut dari berbagai aspek (ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan)

ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

Analisis Perumusan Kebijakan Publik

Tujuan Pembelajaran

Mampu menjelaskan analisis perumusan kebijakan publik

A

Masa Depan Kebijakan Publik

1. Peramalan/forecasting

suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Ramalan mempunyai tiga bentuk utama yaitu: proyeksi, prediksi dan perkiraan.

- a. **Suatu proyeksi adalah** ramalan yang didasarkan pada **ekstrapolasi atas kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan**. Proyeksi membuat pernyataan yang tegas berdasarkan argumen yang diperoleh dari metode tertentu dan kasus yang paralel di mana asumsi mengenai validitas metode tertentu (misalnya analisis antar waktu) atau kemiripan kasus. Proyeksi dapat diperkuat dengan argumen dari pemegang otoritas (seperti opini para pakar) dan logika kausal (misalnya teori ekonomi atau politik).
- b. **Sebuah prediksi adalah** ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritik yang tegas. Asumsi ini dapat berbentuk hukum teoritis (misalnya hukum berkurangnya nilai uang), proporsi teoritis (misalnya proposisi bahwa pecahnya masyarakat sipil diakibatkan oleh kesenjangan antara harapan dan kemampuan) atau analogi.

- c. Suatu perkiraan (*conjecture*) adalah ramalan yang didasarkan pada penilaian yang informatif atau penilaian pakar tentang situasi masyarakat masa depan. Penilaian ini dapat berbentuk penilaian yang intuitif dimana diasumsikan adanya kekuatan batin dan kreatif dari para intelektual atau pengetahuan terpendam dari para pelaku kebijakan.

2. Ramalan kebijakan

Didasarkan pada ekstrapolasi, teori atau peramalan informatif, mempunyai beberapa tujuan penting:

- a. Ramalan menyediakan informasi tentang perubahan kebijakan di masa depan dan konsekuensinya. Tujuan dari peramalan mirip dengan tujuan dari kebanyakan riset eksakta maupun sosial, sejauh kedua riset ini berusaha dengan baik untuk memahami maupun untuk mengendalikan lingkungan manusia dan material. namun, usaha untuk meramal situasi sosial masa depan terutama dimaksudkan untuk mengontrol yakni berusaha untuk merencanakan dan menetapkan masa kebijakan sehingga tindakan yang terbaik dapat dipilih diantara berbagai kemungkinan yang ditawarkan di masa depan.
- b. Peramalan memungkinkan kontrol yang lebih besar karena dipahaminya kebijakan masa lalu dengan konsekuensinya, suatu tujuan yang mengandung arti bahwa masa depan ditentukan oleh masa lalu. Namun ramalan juga memungkinkan kita membentuk masa depan secara aktif, lepas dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Dengan berkiblat di masa depan, analisis kebijakan harus bertanya-tanya tentang nilai apa yang bisa atau harus membimbing tindakan di masa depan. Tetapi hal ini menyeret kita ke persoalan kedua yang sama sulitnya: bagaimana bisa seorang analis mengevaluasi bahwa situasi tertentu di masa depan itu memang diharapkan?

3. Jenis-jenis masa depan

Ramalan kebijakan dalam bentuk proyeksi, prediksi maupun perkiraan, dipakai untuk mengestimasi tiga jenis situasi social masa depan: masa depan potensial (potential future), masa depan yang masuk akal plausible), dan masa depan normatif.

- a. **Masa depan potensial (sering kali disebut masa depan alternatif) adalah** situasi sosial masa depan yang mungkin terjadi, yang berbeda dengan situasi sosial yang memang terjadi. Situasi masa depan tidak pernah pasti sampai dia benar-benar terjadi, dan oleh karena itu banyak masa depan potensial.
- b. **Masa depan yang masuk akal, adalah** situasi masa depan yang, atas dasar asumsi tentang hubungan antara lingkungan dan masyarakat, diyakini akan berlangsung jika pembuat kebijakan tidak mengintervensinya guna merubah arah suatu peristiwa.
- c. **Masa depan normatif adalah** masa depan yang potensail maupun plausible yang konsisten dengan konsep analisis tentang kebutuhan, nilai dan kesempatan yang ada di masa depan. Penyebutan masa depan normatif mempersempit ruang untuk masa depan potensial sehingga dapat menyambung ramalan dengan tujuan dan sasaran spesifik.

B

Identifikasi Isu Publik

1. Makna Isu Kebijakan

Makna yang terkandung dalam terminologi isu untuk lingkup analisis kebijakan publik berbeda dengan apa yang umumnya dipahami orang awam dalam percakapan sehari-hari. pemahaman isu pada percakapan keseharian sering disalah kaprahkan dan tidak jarang dikenakan pada suatu peristiwa yang berkonotasi negative.

Makna “isu” sering diidentikkan dengan “kabar burung”. Dalam kajian ini, isu bukanlah dalam makna yang berkonotasi dengan peristiwa peristiwa negatif, sepele atau amat disederhana.

oleh karenanya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meluruskan permaknaan isu tersebut. Walaupun juga perlu diakui bahwa di berbagai literatur, istilah isu tersebut sering dirumuskan secara jelas, namun



sebagai suatu “*technical term*” utamanya dalam konteks kebijakan publik, muatan maknanya lebih kurang sama dengan apa yang sering disebut sebagai “masalah kebijakan”.

dalam analisis kebijakan publik, konsep ini menempati posisi sentral. Hal ini terjadi barangkali ada kaitannya dengan fakta, bahwa proses pembuatan kebijakan publik apapun pada umumnya berawal dari adanya *awareness of a problem* (kesadaran akan adanya masalah tertentu).

Dunn membagi perangkat isu kebijakan secara berurutan yang terdiri atas isu utama, isu sekunder, isu fungsional dan isu minor. Berdasarkan kategori ini, makna penting yang melekat pada suatu isu akan ditentukan oleh perangkat yang dimiliki. artinya, makin tinggi status peringkat yang diberikan atas suatu isu, maka pada umumnya semakin strategis pula posisinya secara politis. Sebagai contoh kasus misalnya, antara status peringkat masalah pergantian pengurus organisasi politik tingkat wilayah kecamatan merupakan masalah yang dalam perseptif politik cukup ekstrem.

Kategorisasi tersebut di atas hendaknya tidak dipahami secara kaku karena dalam praktiknya masing-masing peringkat isu tadi bisa jadi tumpang tindih,

suatu isu yang semula hanya merupakan isu sekunder, berikutnya dapat berubah menjadi isu utama.

2. Beberapa criteria untuk suatu isu kebijakan dapat dijadikan agenda kebijakan antara lain:

- a. Isu tersebut telah mencapai titik kritis tertentu, sehingga isu tersebut praktis tidak lagi diabaikan begitu aja, atau isu tersebut telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman serius yang apabila segera diatasi justru akan menimbulkan luapan kritis baru yang jauh lebih hebat dimasa datang.
- b. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak yang bersifat dramatik.
- c. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak, bahkan umat manusia pada umumnya, akan mendapatkan dukungan berupa liputan media massa yang luas.
- d. Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.
- e. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitinsasi) dalam masyarakat.
- f. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang fasionable, di mana posisinya sulit untuk dijelaskan tetapi mudah dirasakan kehadirannya.

3. Tipologi Isu-Isu kebijakan

Isu kebijakan dapat diklasifikasikan sesuai dengan hierarki dari tipe-tipenya. Tipe-tipe tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Isu Utama (major issues).** Isu ini mencakup yurisdiksi territorial suatu Negara. wiliame N. Dunn menandai isu ini secara khusus ditemui pada tingkat pemerintah tertinggi didalam atau diantara yurisdiksi/wewenang federal, bagian dan local. Isu-isu utama secara khusus meliputi persoalan tentang misi instansi,

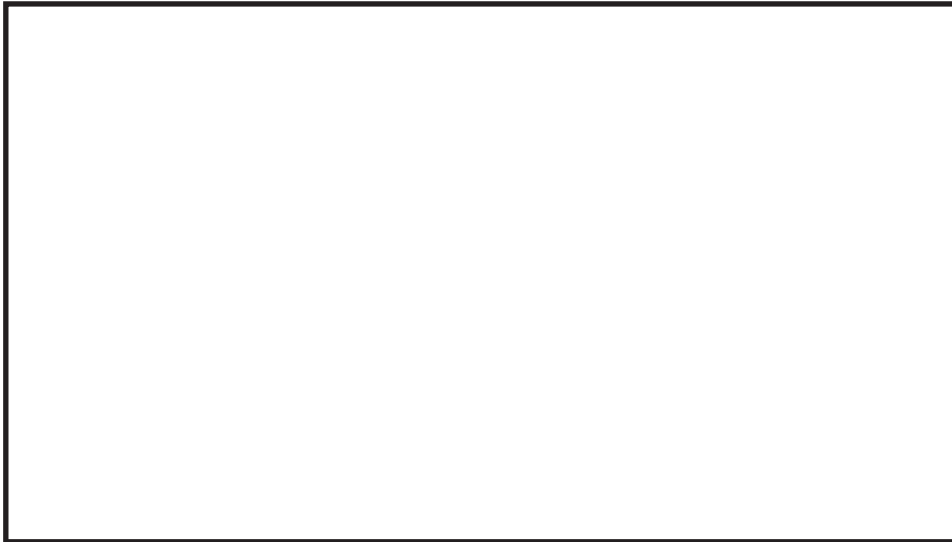
sifat-sifat dan tujuan organisasi pemerintah, seperti departemen kesehatan, departemen pendidikan dan sebagainya.

- b. **Isu sekunder (*secondary issues*)** adalah isu yang terletak pada tingkat instansi pelaksana program-program di pemerintahan federal, Negara bagian, dan local. Isu ini dapat berisi prioritas-prioritas program dan definisi kelompok-kelompok sasaran dan penerima dampak. Contoh isu ini ialah isu mengenai bagaimana mendefinisikan kemiskinan keluarga.
- c. **Isu Fungsional (*functional issues*)**, ialah isu yang terletak di antara tingkat program dan proyek, dan memasukkan pertanyaan-pertanyaan seperti anggaran, keuangan, dan usaha untuk memperolehnya.
- d. **Isu minor (*minor issues*)** adalah isu-isu yang ditemukan paling sering pada tingkat proyek-proyek yang spesifik. isu minor meliputi personal, staff, keuntungan bekerja, waktu liburan, jam kerja, dan petunjuk pelaksanaan

Untuk lebih jelasnya mari kita simak video penjelasan mengenai **Analisis Perumusan Kebijakan Publik** dengan scan QR Code di samping atau dengan klik video di bawah ini!



SCAN ME



PROJECT

1. Pilih sebuah isu kebijakan publik yang saat ini sedang hangat dibicarakan di Indonesia (misalnya, kebijakan pendidikan, kesehatan, atau lingkungan).
2. Kumpulkan data historis terkait isu tersebut selama 10 tahun terakhir.
3. Gunakan data tersebut untuk membuat proyeksi kebijakan publik 5 tahun ke depan.

ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

Analisis Formulasi Kebijakan Publik

Tujuan Pembelajaran

Mampu menjelaskan analisis formulasi kebijakan publik

A

Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Didalamnya terdapat ruang dimana terjadi pemaknaan apa yang disebut dengan masalah publik dan prioritas dalam agenda politik diperebutkan, dan jika sebuah isu mampu mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapat prioritas dalam agenda, maka isu tersebut mendapat alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu yang lainnya.

Agenda merupakan pola perilaku pemerintah yang sifatnya spesifik. Ini dapat diartikan sebagai analisis tentang bagaimana suatu masalah dikembangkan, didefinisikan, dirumuskan, dan diselesaikan. Jika agenda penyusunan agenda dilakukan secara terbuka maka akan menguntungkan kelompok-kelompok yang kuat. Namun, jika dilakukan secara tertutup akan menimbulkan kelemahan-kelemahan.

Karena kebijakan publik sebagai upaya untuk memecahkan masalah publik, maka proses penyusunan kebijakan publik juga harus dimulai dari penyusunan agenda yang disusun berdasarkan partisipasi publik juga.



Penyusunan agenda kebijakan selalu dipengaruhi oleh kondisi politik. Dalam agenda setting terdapat isu-isu kebijakan sebagai hasil dari silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang akan ditempuh oleh pemerintah.

Isu kebijakan ada karena telah terjadi konflik atau “**perbedaan persepsi**” diantara para aktor atau suatu situasi problematik yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu. Pengambil keputusan tidak menunggu sampai muncul tuntutan nyata dari publik. Perumusan masalah dapat mengungkapkan asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab, menetapkan tujuan untuk menyesuaikan pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

Proses penyusunan agenda kebijakan antara lain: private problems, public problems, issues, systemic agenda, dan institusional agenda. Penyusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah (*problems*) yang muncul di masyarakat. Masalah ini dapat digambarkan oleh seseorang sebagai masalah pribadi (*private problem*).

Masalah pribadi adalah masalah yang berdampak langsung atau hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat langsung, kemudian berkembang lebih lanjut menjadi masalah publik (*public problem*). Masalah publik diartikan sebagai masalah yang mempunyai akibat yang luas, termasuk akibat-akibat mengenai orang-orang yang terlibat secara tidak langsung.

Gambaran tentang pemecahan masalah bertolak dari pandangan bahwa kerja kebijakan bermula dari masalah-masalah yang sudah berubah dengan sendirinya. Kebijakan berawal ketika masalah-masalah yang terlihat, masalah kepada seseorang dapat membuat hipotesis tentang serangkaian tindakan yang mungkin terjadi kepada seseorang dapat menunjukkan tujuan-tujuan dan masalah yang jelas, tetapi terjadi adanya kekhawatiran yang nampak.

Kelompok perumus politik menjadi aktif tidak seperti biasanya kegiatan mereka menjadi lebih terberitakan.

Public problems sangat banyak dan kompleks hanya sebagian kecil yang bisa memperoleh kepedulian pemerintah dan kecondongan perhatian perumus kebijakan menimbulkan the policy agenda.

Agenda pemerintah seringkali tidak seiring dengan *political demands* dan juga berbeda dengan *political priorities*. Jumlahnya tidak terbatas dan menempatkan yang lebih penting. Agenda pemerintah jumlahnya terbatas dan harus memandang secara yakin dan aktif. Agenda sistematis lebih bersifat abstrak dan seringkali tidak diiringi alternatif cara pemecahan. Agenda pemerintah bersifat lebih nyata. Agenda politik umumnya bersifat khusus dan baru. Agenda pemerintah bersifat umum dan mungkin merupakan isu lama atau baru.

Bagaimana sebuah masalah publik dapat masuk ke dalam agenda pemerintah?

1. Terdapat ancaman terhadap keseimbangan antar kelompok.
2. Pemimpin memanfaatkan kepemimpinannya untuk memperoleh dukungan politik.
3. Timbulnya krisis atau peristiwa luar biasa.
4. Adanya gerakan-gerakan protes dan kekerasan.
5. Adanya isu yang dipropagandakan oleh media massa sehingga menarik perhatian masyarakat.

B | Identifikasi Masalah Kebijakan Publik

Proses perumusan kebijakan merupakan salah satu alat penting dalam tahapan kebijakan yang berkaitan dengan

pengelolaan kebijakan, baik pemerintah maupun non pemerintah. Perumusan masalah merupakan langkah awal dalam pembuatan suatu kebijakan publik.

Suatu perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersonalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan

Hal tersebut **disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat dikarenakan adanya masalah publik yang terjadi sehingga permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan mencapai tujuan yang diharapkan.**

Kedua, masalah kebijakan haruslah bersifat subyektif, di mana masalah tersebut merupakan hasil dari pemikiran dalam lingkungan tertentu. Ketiga, suatu fenomena yang dianggap sebagai masalah karena adanya keinginan manusia untuk mengubah situasi.

Keempat, solusi masalah politik dapat berubah-ubah. Maksudnya, adalah kebijakan yang sama untuk masalah yang sama dan belum tentu solusinya sama karena dari waktu yang berbeda atau lingkungan yang berbeda.

Masalah didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan bagi sebagian orang, yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Sementara itu, suatu masalah



akan menjadi masalah publik jika melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat tidak hanya pada orang-orang yang secara langsung terlibat, tetapi juga sekelompok orang yang secara tidak langsung terlibat.

1. Masalah-masalah publik

Suatu masalah akan menjadi masalah publik apabila ada orang atau kelompok yang melakukan ke arah tindakan untuk memecahkan masalah tersebut. Suatu masalah akan menjadi masalah publik jika masalah tersebut jelas. Masalah-masalah publik adalah masalah-masalah yang mempunyai dampak luas dan mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak terlibat secara langsung. Masalah-masalah publik dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori.

- a. Kategori pertama, masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah prosedural dan masalah substantif. Masalah procedural berkaitan dengan bagaimana pemerintah diorganisir dan bagaimana cara pemerintah melakukan tugas-tugasnya, sedangkan masalah substantif berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia.
- b. Kategori kedua, didasarkan pada penyebab masalah. Berdasarkan kategori ini, masalah publik dapat dibagi menjadi masalah luar negeri dan masalah dalam negeri.
- c. Kategori ketiga, dibedakan berdasarkan kategori jumlah orang yang dipengaruhi serta hubungannya antara satu dengan yang lain. Berdasarkan kategori ini, masalah publik dibedakan menjadi masalah distributif, masalah regulasi, dan masalah redistributif.

Masalah distributif mempengaruhi sejumlah kecil orang dan dapat ditangani secara individual, sedangkan masalah regulasi mendorong timbulnya tuntutan yang diajukan dalam rangka membatasi tindakan-tindakan pihak lain. Adapun masalah redistributif menyangkut masalah yang menghendaki perubahan sumber-sumber antarkelompok atau kelas dalam masyarakat. Kebijakan ini berawal dari konflik dan melibatkan konflik kelas.

2. Tipe-tipe Masalah Kebijakan

Ada dua tipe masalah publik, yaitu :

- a. Masalah tersebut ditandai dengan adanya perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan.
- b. Masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara individu, tetapi tidak terorganisir dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai.



Perumusan Kebijakan Publik

Ada beberapa tahap-tahap perumusan kebijakan publik, yaitu : **Tahap pertama**, perumusan masalah kebijakan publik. Tahap ini adalah tahap ketika masalah diangkat, kemudian para pembuat kebijakan mencari dan menentukan identitas masalah kebijakan serta merumuskannya.

Tahap kedua, penyusunan agenda pemerintah. Dari sekian banyak masalah umum, hanya sedikit yang memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Pilihan pembuat kebijakan terhadap sejumlah kecil masalah umum menyebabkan timbulnya agenda kebijakan.

Tahap ketiga, perumusan usulan kebijakan publik, yaitu kegiatan menyusunan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah.

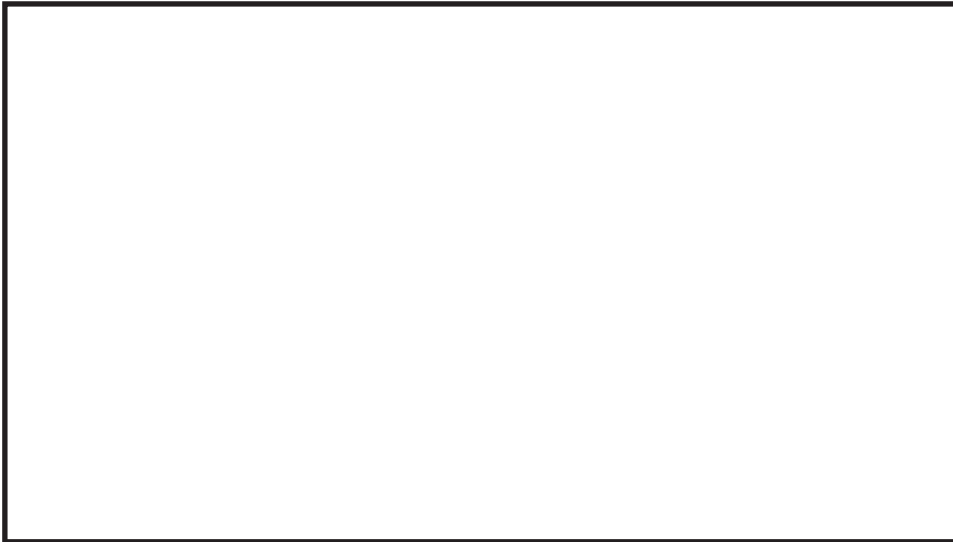
Tahap keempat, pengesahan kebijakan publik adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran yang diterima.

Tahap kelima, pelaksanaan kebijakan publik, yaitu usulan kebijakan yang telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang, kemudian keputusan kebijakan itu siap diterapkan. Tahap keenam, penilaian kebijakan publik adalah langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Penilaian kebijakan publik dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan publik.

Untuk lebih jelasnya mari kita simak video penjelasan mengenai **Analisis Formulasi Kebijakan Publik** dengan scan QR Code di samping atau dengan klik video di bawah ini!



SCAN ME



PROJECT

1. Pilih sebuah kebijakan publik yang telah diterapkan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kumpulkan data historis terkait isu tersebut selama 10 tahun terakhir.
2. Kumpulkan data dan informasi tentang implementasi kebijakan tersebut dari berbagai sumber.
3. Gunakan metode evaluasi kebijakan untuk menilai dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat.
4. Identifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.
5. Buat laporan tertulis yang menjelaskan proses dan hasil evaluasi Anda.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Analisis Implementasi Kebijakan Publik

Tujuan Pembelajaran

Mampu menjelaskan analisis implementasi kebijakan publik



Birokrasi

Bertugas **mengimplementasikan kebijakan** dan struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Untuk mendorong kinerja struktur birokrasi terdapat dua karakteristik yang dapat digunakan, yaitu: a. Adanya *Standard Operating Procedure (SOP)* yang fleksibel yang dijadikan sebagai pedoman bagi para pegawai dalam melaksanakan kegiatannya. b. Adanya pembagian kerja melalui pembagian tanggung jawab atas aktivitas dan program-program yang dijalankan kepada beberapa unit kerja yang berkompeten dibidang tersebut.

1. Fungsi Birokrasi

- a. Memberikan layanan publik
- b. Melaksanakan pembangunan yang profesional
- c. Pengawas, pelaksana, dan perencana kebijakan.
- d. Sebagai perantara pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak menjadi bagian dari kekuatan politik (netral)

2. Peran Birokrasi

- a. Menyesuaikan dengan tujuan pemerintahan.

- b. Visi dan Misi kegiatan serta program pemerintah dan negara dapat tercapai.
 - c. Dengan profesional dan bersikap netral cara melayani masyarakat dan dalam pelaksanaan pembangunan.
 - d. Manajemen pemerintah yang dijalankan, mulai dari perencanaan, koordinasi, sinkronisasi, pengawasan, evaluasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dll.
 - e. Pandangan masyarakat yang cenderung negatif melihat kinerja birokrat. Birokrasi yang selalu dianggap menyulitkan, tidak efektif dan efisien dalam menjalankan sistemnya.
 - f. Pendapat dari masyarakat tentang birokrasi adalah selalu mengutamakan masyarakat yang kaya dibanding dengan masyarakat miskin.
- Namun begitu, masyarakat juga tetap membutuhkan birokrasi sebagai narahubung antara negara dan masyarakat. Kewajiban dari birokrasi adalah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan

B | Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia memiliki posisi sebagai **aset terpenting** dalam **suatu organisasi** baik sektor **publik** maupun **privat**. Sering kali implementasi kebijakan menghadapi kegagalan dikarenakan SDM atau staf pelaksana implementasi kebijakan tidak mumpuni dan berkompeten di dalam menjalankan kebijakan yang telah diputuskan tersebut.

C | Dukungan Finansial, Sarana, dan Prasarana

Fasilitas, adanya sarana dan prasarana yang baik menjadi **faktor penting** dalam proses **implementasi kebijakan**. Dengan adanya prasarana yang memadai akan menunjang kinerja pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada.



Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya **kejujuran dan komitmen yang tinggi**. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya komitmen yang tinggi dari para pelaksana maka pelaksanaan peraturan atau kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sikap dari pelaksana kebijakan ini dapat dipengaruhi oleh insentif yang diberikan kepada pelaksana kebijakan.

Peran masyarakat mempunyai arti yang sangat luas, para ahli mengatakan bahwa partisipasi atau peran masyarakat terutama merupakan sikap dan perilaku tetapi batas-batasnya tidak jelas, tetapi mudah dirasakan, dihayati dan dipraktikkan tetapi sulit dirumuskan.

Peran masyarakat adalah peran serta individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam setiap gerakan upaya upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab kesehatan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Tujuan Peran Masyarakat :

1. Meningkatkan peran dan kemandirian serta kerjasama dengan LMS yang memiliki visi yang tepat.
2. Meningkatkan ukuran jaringan kelembaga, LMS dan masyarakat.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan dan proses pembangunan dengan meningkatkan jaringan kemitraan dengan masyarakat

Jenis Ketrewakilan	Tingkat Keterwakilan	
	Sempit	Luas
Palsu	<i>Keputusan</i> : kurang transparan dibuat oleh pejabat publik <i>Partisipasi</i> : simbolik, hanya segelintir orang yang terlibat	<i>Keputusan</i> : dibuat oleh pejabat publik <i>Partisipasi</i> : simbolik, meskipun melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat
Parsial	<i>Keputusan</i> : dibuat oleh sekelompok elit pemerintah dengan mempertimbangkan masukan dari kelompok kepentingan yang terbatas <i>Partisipasi</i> : hanya melibatkan kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh, sedangkan sebagian masyarakat tidak mempunyai kesempatan sama sekali	<i>Keputusan</i> : dibuat oleh pejabat pemerintah dengan pengaruh yang sangat sedikit dari partisipasi masyarakat <i>Partisipasi</i> : melibatkan berbagai kelompok kepentingan namun peluang berpartisipasi disediakan dalam sesi yang sangat terbatas

Penuh

Keputusan : dibuat oleh pejabat pemerintah dan kelompok kepentingan yang terpilih

Partisipasi : melibatkan kelompok kepentingan yang mempunyai pengaruh, namun sebagian besar warnanegara tetap kurang memiliki kesempatan

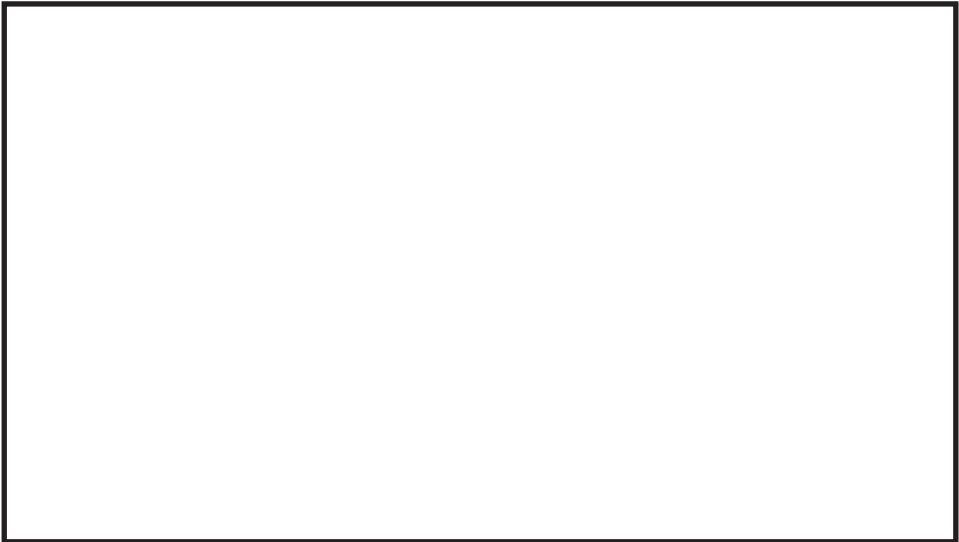
Keputusan : dibuat oleh pejabat pemerintah dengan pengaruh yang sangat kuat dari partisipasi masyarakat

Partisipasi : masyarakat luas terlibat dalam diskusi yang cukup intensif dengan masyarakat

Untuk lebih jelasnya mari kita simak video penjelasan mengenai **Analisis Implementasi Kebijakan Publik** dengan scan QR Code di samping atau dengan klik video di bawah ini!



SCAN ME



PROJECT

1. Pilih sebuah kebijakan publik yang memerlukan partisipasi publik yang signifikan (misalnya, kebijakan lingkungan hidup atau kesehatan masyarakat)
Kumpulkan data tentang tingkat partisipasi publik
2. dalam implementasi kebijakan tersebut (misalnya, melalui survei, wawancara, atau observasi)
3. Analisis peran partisipasi publik dalam keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut.
Buat laporan tertulis yang menjelaskan hasil analisis dan rekomendasi anda.

ANALISIS MONITORING IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

| Analisis Monitoring Implementasi Kebijakan Publik

Tujuan Pembelajaran

Mampu menjelaskan analisis monitoring implementasi kebijakan publik.

Apa itu Monitoring ?

Monitoring dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, untuk mengikuti perkembangan suatu program yang dilakukan secara mantap dan teratur serta terus menerus.

A | Tujuan Monitoring

Pemantauan (monitoring) adalah salah satu prosedur analisis kebijakan yang berfungsi untuk pemberi informasi terkait dengan sebab dan akibat dari kebijakan publik, karena kemungkinan analisa dapat mendeskripsikan hubungan antara program kebijakan dan hasilnya, maka dari itu pemantauan merupakan suatu sumber informasi utama implementasi (Dunn, 1981).

Tujuan monitoring adalah untuk:

1. **Menghindari** terjadinya **penyimpangan/kesalahan/keterlambatan**, untuk dapat **diluruskan**.
2. **Memastikan** dalam proses **implementasi sesuai** dengan **model implementasi** yang diinginkan.
3. **Memastikan** bahwa **implementasi kebijakan** menuju kearah **kinerja kebijakan** yang **dikehendaki**.

B | Fungsi Monitoring

Menurut (Dunn, 1981) monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

1. Ketaatan (compliance)

Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Pemeriksaan (auditing)

Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.

3. Laporan (accounting)

Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

4. Penjelasan (explanation)

Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Jenis Monitoring

Jenis monitoring dalam program adalah sebagai berikut;

1. Monitoring hasil

Monitoring menyatu dengan evaluasi untuk **menetapkan** apakah **pencapaian hasil program** yang **diharapkan sesuai dengan target** (output, outcome, dampak) contoh; program bantuan program keluarga harapan (PKH) akan memantau penerima bantuan yang dilakukan mencapai output pada pada keluarga kurang mampu apakah sudah tepat sasaran.

2. Monitoring kegiatan/proses

Memantau penggunaan input dan sumber daya, kemajuan kegiatan dan pencapaian output. Kegiatan ini lebih **mengkaji** bagaimana kegiatan itu **dilaksanakan** – **efisiensi** dalam hal **waktu dan sumber daya** contoh; program pembangunan jalan tani akan memantau, bahwa petani menjadi sasaran penerima manfaat sesuai dengan jadwal.

3. Monitoring kepatuhan

Bagaimana **memastikan kepatuhan** terhadap **aturan-aturan** yang telah **disepakati** secara **bersama-sama** sesuai dengan **regulasi** atau **undang-undang** yang berlaku. **Contohnya**; suatu pembangunan proyek perumahan bersubsidi akan turun langsung memantau apakah bangunannya sesuai dengan standar konstruksi yang telah disepakati dari awal dan spesifikasinya secara nasional.

4. Monitoring situasi/konteks

Dilakukan dengan **diskusi refleksi** dan **melibatkan individu** yang terlibat dalam kegiatan **dimasa** yang akan **mendatang** senantiasa terbuka dan memungkinkan mengingat akan **perkembangan situasi**.

5. Monitoring penerima manfaat

Monitoring ini kita bisa turun langsung untuk **melihat perkembangan bantuan** yang telah **diberikan** terhadap **penerima manfaat**.

6. Monitoring keuangan

Pemantauan keluar masuknya berkas pada **pengelola keuangan** dengan tujuan untuk **menghindari** adanya **kesalahan** dalam **menginput** maupun **tidak tertibnya berkas** yang **keluar masuk**, pengelolaan keuangan yang masih manual biasanya masih terjadi kesalahan yakni kesulitan dalam tertib administrasi.

7. Monitoring organisasi

Memonitoring **keberlanjutan pembangunan** dan **meningkatkan kapasitas** organisasi. **Contoh;** pemerintah menggunakan monitoring kapasitas dalam organisasi untuk memantau komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program di Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Apa itu Distribusi Kekuasaan ?

Distribusi kekuasaan merujuk pada bagaimana wewenang dan tanggung jawab dibagi antara berbagai aktor dan lembaga dalam sistem pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan.

D | Pengaruh Distribusi Kekuasaan

Distribusi kekuasaan dalam monitoring kebijakan publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi proses monitoring. Distribusi kekuasaan merujuk pada bagaimana **kekuasaan dan tanggung jawab** dibagi **di antara berbagai aktor dan lembaga** yang terlibat dalam implementasi dan pemantauan kebijakan. Berikut adalah beberapa pengaruh utama distribusi kekuasaan dalam monitoring kebijakan publik:

1. Pengaruh Positif

a. Desentralisasi dan Pemberdayaan Lokal

Pengambilan Keputusan Lokal: Desentralisasi kekuasaan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan tingkat lokal, di mana implementasi kebijakan terjadi. Ini dapat meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan lokal dan kondisi spesifik.

Pemberdayaan Komunitas: Komunitas lokal yang diberdayakan dan memiliki kekuasaan untuk mengawasi kebijakan dapat berkontribusi pada pemantauan yang lebih akurat dan relevan.

b. Kolaborasi dan Partisipasi Multi-Stakeholder

Inklusi Beragam Pemangku Kepentingan: Distribusi kekuasaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses monitoring.

Partisipasi Aktif: Keterlibatan berbagai aktor dalam proses monitoring dapat meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan, karena lebih banyak perspektif dan informasi yang tersedia.

2. Pengaruh Negatif

a. Fragmentasi dan Inkonsistensi

Koordinasi yang Lemah: Distribusi kekuasaan yang terlalu terfragmentasi dapat menyebabkan koordinasi yang buruk antara lembaga-lembaga yang berbeda, sehingga menghambat efektivitas monitoring.

Standar yang Berbeda: Berbagai aktor mungkin memiliki standar dan metode yang berbeda dalam melakukan monitoring, yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam pengumpulan dan analisis data.

b. Fragmentasi dan Inkonsistensi

Pengaruh Politik: Kekuasaan yang didistribusikan di antara aktor-aktor politik dapat mengarah pada penggunaan monitoring sebagai alat politik, di mana data dan hasil monitoring dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu.

Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Distribusi kekuasaan yang tidak diawasi dengan baik dapat menciptakan peluang bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang menghambat proses monitoring yang transparan, akuntabel, dan informasi yang tersedia.

3. Pengaruh Distribusi Kekuasaan terhadap Monitoring

a. Desentralisasi

Dalam sistem desentralisasi, kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Monitoring dapat menjadi lebih kompleks karena memerlukan koordinasi antar tingkat pemerintahan. Namun, desentralisasi juga dapat meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas lokal.

b. Sentralisasi

Dalam sistem sentralisasi, monitoring lebih terkoordinasi dan seragam, tetapi mungkin kurang responsif terhadap kebutuhan lokal.

c. Peran Lembaga Independen

Lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memberikan pengawasan independen yang objektif dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan.

d. Kolaborasi antar Lembaga

Kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah dapat memperkuat proses monitoring dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang berbeda.

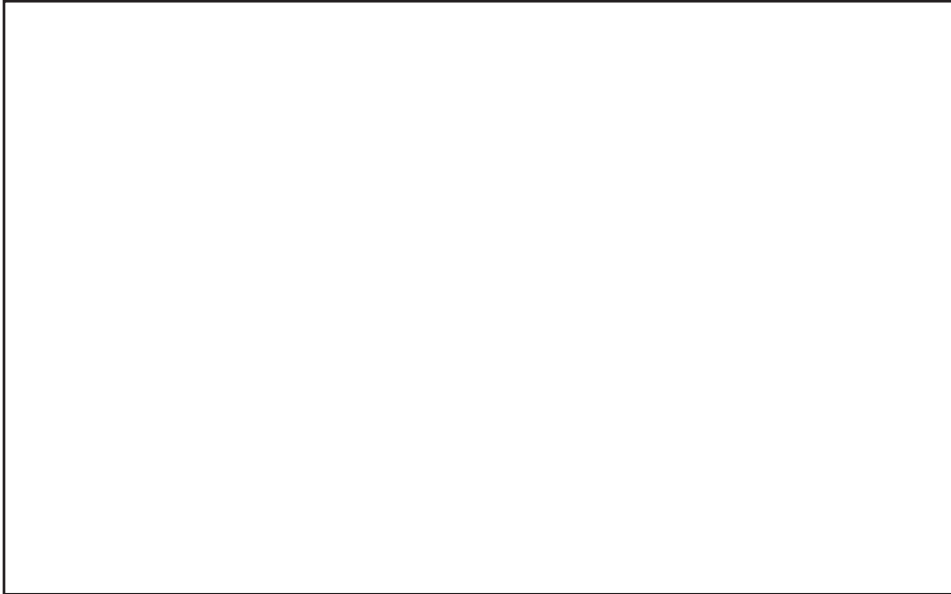
e. Keterlibatan Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses monitoring dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memberikan perspektif yang beragam mengenai pelaksanaan kebijakan.

Untuk lebih jelasnya mari kita simak video penjelasan **Analisis Monitoring Implementasi Kebijakan Publik** dengan scan QR CODE di samping atau dengan klik video di bawah ini!



SCAN ME



PROJECT

1. Pilih satu kebijakan publik yang telah atau sedang diimplementasikan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
2. Buat rencana monitoring yang mencakup jenis-jenis monitoring yang relevan (hasil, kegiatan/proses, kepatuhan, situasi/konteks, penerima manfaat, keuangan, dan organisasi).

ANALISIS EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK

| Analisis Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik

Tujuan Pembelajaran

Mampu menjelaskan analisis evaluasi kinerja kebijakan publik.

Apa itu Analisis Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik?

Analisis Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak dari kebijakan publik yang telah diimplementasikan.



Model Evaluasi Kebijakan Publik

1. Model Helmut Wollman

Ada tiga tipe evaluasi kebijakan publik yaitu Ex-ante evaluation, Ongoing evaluation dan Ex-post evaluation. Wollman (2007) menjelaskan tiga tipe evaluasi kebijakan publik tersebut sebagai berikut:

a. Ex-ante evaluation

Evaluasi kebijakan publik dilakukan **sebelum kebijakan diimplementasikan**. Evaluasi ini dimaksudkan sebagai tindakan antisipasi dan penilaian awal prediksi dampak serta konsekuensi kebijakan yang direncanakan atau telah ditetapkan. Kegiatan Evaluasi ini dapat mempeberikan informasi yang relevan dalam proses pembuatan kebijakan publik yang sedang berjalan. **Ex-ante evaluation** merupakan **instrumen penting penentuan alternatif berbagai opsi kebijakan yang ada**. Evaluasi tipe ini juga memberikan analisa dampak terhadap lingkungan kebijakan.

b. Ongoing Evaluation

Dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak dan hasil pelaksanaan kebijakan publik yang sedang berjalan. Esensi dari Ongoing evaluation guna memberikan informasi yang relevan, kembali pada proses implementasi kebijakan di setiap titik tertentu implementasi kebijakan. Hasil evaluasi berupa informasi dari proses pelaksanaan sedang berlangsung dapat dipergunakan memperbaiki, revisi, “meluruskan” kembali proses – proses pelaksanaan kebijakan ke arah yang sesungguhnya ingin dicapai.

c. Ex-post evaluation

Ex-post evaluation merupakan varian klasik evaluasi kebijakan publik. Evaluasi ini ditujukan memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan.

2. Model William Dunn

Model evaluasi kebijakan publik menurut William Dunn (1990) menekankan sejumlah fungsi utama analisa kebijakan publik, sebagai berikut:

a. Evaluasi memberi informasi valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya perbaikan kesehatan) dan target tertentu telah dicapai.

b. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari capaian tujuan dan target kebijakan publik. Nilai itu dapat di fahami pada rumusan dan definisi operasional tujuan dan target. Mempertanyakan nilai-nilai – nilai tujuan kebijakan publik dapat dilakukan dengan

mengkaitkan nilai tujuan kebijakan dengan masalah yang hendak diselesaikan melalui kebijakan publik tersebut. Mempertanyakan kepantasan nilai yang mendasari tujuan dan sasaran kebijakan publik diharapkan menghasilkan alternative sumber nilai baru dari kelompok kepentingan, birokrat pelaksana kebijakan, dan kelompok-kelompok lain yang terlibat pada proses kebijakan itu. Dengan demikian nilai-nilai dari tujuan kebijakan lebih rasional baik pada aspek teknis, ekonomi, legal sosial, dan substantif.

- c. **Evaluasi kebijakan publik memberi kontribusi aplikasi metode analisis kebijakan**, khususnya pada “perumusan masalah” dan “rekomendasi”. Dari Rumusan masalah dan rekomendasi kebijakan tersebut, evaluasi juga diharapkan dapat menyediakan Informasi tentang memadai atau tidaknya kinerja kebijakan. Apabila dipandang rumusan masalah dan rekomendasi tidak memadai, maka dapat dilakukan perumusan masalah ulang untuk menjadi lebih sesuai dengan target dan tujuan kebijakan publik.
- d. **Evaluasi kebijakan publik juga dapat dimaksudkan untuk mendefinisikan alternatif kebijakan baru atau merevisi kebijakan yang ada.** Ketika alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya ternyata tidak maksimal. Ada alternative kebijakan yang lebih baik. Melalui evaluasi alternative kebijakan sebelumnya dapat diperbaiki.

3. Model Lester dan Steward, Jr

Model evaluasi kebijakan publik dari Lester dan Steward, Jr (2000) mengkategorisasi evaluasi kebijakan publik menjadi empat tipe, yaitu:

- a. **Evaluasi kebijakan publik tipe proses.** Evaluasi yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan;

- a. **Evaluasi kebijakan publik tipe dampak.** Evaluasi yang berkaitan dengan hasil dan atau pengaruh diimplementasinya kebijakan publik tersebut;
- b. **Tipe evaluasi kebijakan publik untuk menguji kesesuaian** antara hasil kebijakan dengantujuan yang ingin dicapai; dan
- c. **Evaluasi kebijakan publik tipe meta evaluasi.** Evaluasi kebijakan publik terhadap berbagai implementasi kebijakan yang ada, untuk menemukan kesamaan tertentu.

4. Model Anderson

Model Evaluasi kebijakan publik Anderson (2000) membagi evaluasi kebijakan publik **berfokus** pada aspek **implementasi kebijakan publik**. Ada tiga asumsi evaluasi atas implementasi kebijakan publik: Pertama, **evaluasi implementasi kebijakan publik** diasumsikan sebagai **kegiatan fungsional**. Kedua, **evaluasi implementasi kebijakan publik** fokus pada **bekerjanya kebijakan**. Ketiga, **evaluasi implementasi kebijakan bersifat sistematis**. Melihat secara objektif pelaksanaan program implementasi kebijakan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengikut dampak implementasi kebijakan bagi masyarakat dan capaian tujuan kebijakan.

5. Model Jones

Model evaluasi kebijakan Jones (1984) lebih **menekankan pada kegiatan untuk melakukan penilaian** kebijakan publik pada aspek **substansi kebijakan, implementasi** serta **dampak kebijakan publik** tersebut. Ada tiga jenis dalam kegiatan evaluasi kebijakan publik, yaitu Political evaluation, Organizational evaluation, dan Substantive evaluation. Penjeasannya sebagai berikut :

- a. **Political evaluation (evaluasi bersifat politis)** dilakukan untuk melihat manfaat program bagi negara. Evaluasi ini untuk memperoleh data dan informasi tingkat penerimaan publik dan dukungan media masa terkait dengan elektoral (keterpilihan) politik atau peluang dipilih kembali reelection dari kebijakan publik yang telah dijalankan oleh pemerintah.
- b. **Organizational evaluation (evaluasi yang bersifat organisasional)** dilakukan untuk mendapatkan jawaban tentang dukungan bagi badan-badan pelaksana. Apakah manfaat bagi badan-badan tersebut melebihi biaya yang dikeluarkan. Apakah kebijakan yang dilakukan, mengarah pada perluasan lebih lanjut bagi badan-badan tersebut.
- c. **Substantive evaluation (evaluasi yang substantif atau bersifat nyata)** dilakukan untuk melihat apakah kebijakan atau program yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara hukum maupun substansi tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Apa dampak kebijakan publik sasaran kebijakan.

B | **Prosedur Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut beberapa ahli ada tiga tipe evaluasi yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan program, yaitu:

1. Evaluasi Pra-program (ex-ante evaluation)

Dilaksanakan sebelum program diimplementasikan, hal ini dilaksanakan **untuk menaksir kebutuhan** atau **pernyataan kebutuhan** pembangunan yang bersangkutan, atau untuk menentukan sasaran potensial dari suatu program pembangunan per-kelompok atau per-region.

2. Evaluasi Tengah Berlangsung (on going/concurrent evaluation)

Dilakukan pada saat program itu diimplementasikan, jadi pada tahap tenggang waktu program itu berjalan dievaluasi.

3. Evaluasi setelah berlangsung (ex-post evaluation)

Dilakukan setelah program itu diimplementasikan **untuk menilai dampak** dan **pengaruh program** itu dengan menghitung seberapa jauh program itu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh program itu.

Prosedur Umum Evaluasi Kebijakan Publik

1. Identifikasi Kebijakan atau Program yang Akan Dievaluasi

- a. Tentukan kebijakan atau program yang akan dievaluasi.
- b. Pastikan tujuan kebijakan atau program tersebut jelas dan dapat diukur.

2. Penentuan Tujuan dan Kriteria Evaluasi

- a. Tetapkan tujuan dari evaluasi tersebut.
- b. Identifikasi kriteria atau indikator yang akan digunakan untuk menilai kebijakan atau program.

3. Pengumpulan Data

- a. Kumpulkan data yang relevan dan diperlukan untuk evaluasi.
- b. Data dapat bersifat kuantitatif (statistik, survei) dan kualitatif (wawancara, studi kasus).

4. Analisis Data

- a. Analisis data yang telah dikumpulkan untuk menilai pencapaian tujuan kebijakan atau program.
- b. Gunakan metode analisis yang sesuai seperti analisis statistik, analisis biaya-manfaat, atau analisis dampak.

5. Penilaian dan Kesimpulan

- a. Berdasarkan analisis data, lakukan penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak kebijakan atau program.
- b. Buat kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan kebijakan atau program tersebut.

6. Rekomendasi

- a. Berikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan atau peningkatan kebijakan atau program di masa depan.

7. Pelaporan

- a. Susun laporan evaluasi yang mencakup metodologi, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
- b. Presentasikan laporan kepada pemangku kepentingan terkait.

8. Tindak Lanjut

- a. Monitor implementasi dari rekomendasi yang diberikan.
- b. Lakukan evaluasi lanjutan jika diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan telah diimplementasikan dan memberikan hasil yang diharapkan.



Kesesuaian Target dengan Hasil

Analisis kesesuaian target dengan hasil mencakup:

1. Penetapan Target yang Jelas

Target harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Penetapan target yang jelas membantu dalam menilai apakah hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2. Pengukuran Kinerja

Menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mengukur hasil yang dicapai. Indikator ini harus relevan dengan tujuan kebijakan.

3. Analisis Gap

Mengidentifikasi kesenjangan antara target dan hasil yang dicapai. Analisis ini membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian atau kegagalan kebijakan.

4. Penilaian Dampak

Menilai dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak ini mencakup perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi akibat implementasi kebijakan.

5. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan analisis gap dan penilaian dampak, memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan agar lebih efektif dalam mencapai target di masa depan.

PROJECT

1. Pilih satu kebijakan publik yang sedang atau telah diimplementasikan di tingkat lokal atau nasional.
2. Lakukan evaluasi terhadap proses implementasi kebijakan berdasarkan dengan salah satu model evaluasi kebijakan publik.

**NASKAH
AKADEMIK
KEBIJAKAN
PUBLIK** |

| Naskah Akademik Kebijakan Publik

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat menyusun naskah kebijakan.

Apa itu Naskah Akademik Kebijakan Publik?

Naskah Akademik Kebijakan Publik adalah dokumen yang berisi kajian akademis dan analisis yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik.

A | Merumuskan Naskah Akademik

Naskah Akademik adalah naskah **hasil penelitian atau pengkajian hukum** dan hasil penelitian lainnya terhadap **suatu masalah tertentu** yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Bagian penting dalam metode penyusunan Naskah Akademik adalah mengenai data yang diperlukan, proses pengumpulan data serta teknik analisis data. Data yang diperlukan dapat berupa **data primer dan data sekunder**. **Data primer** adalah data yang diperoleh secara langsung dari **sumber pertama**. Sedangkan, **data sekunder** adalah data yang diperoleh dari **hasil penelusuran pustaka**; berupa buku, jurnal dan hasil penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yaitu melalui studi kepustakaan/ literatur, workshop, focus group discussion (FGD), diskusi panel, seminar, dan wawancara.

1. Studi Kepustakaan/Literatur

Studi kepustakaan/literatur adalah **penelaahan** terhadap **peraturan perundang-undangan**, putusan pengadilan/ Mahkamah Konstitusi, perjanjian internasional, buku, kamus, ensiklopedia, atau hasil penelitian/ pengkajian yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam Naskah Akademik.

2. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) adalah bentuk **diskusi** yang didesain untuk memunculkan **informasi** mengenai keinginan, **kebutuhan**, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta terhadap materi Naskah Akademik.

3. Diskusi Panel

Diskusi panel adalah pertemuan untuk melakukan pertukaran pemikiran dengan mendengarkan percakapan antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) orang panelis yang mengemukakan topik tertentu atau spesifik yang terkait dengan substansi Naskah Akademik.

4. Seminar

Seminar adalah suatu pertemuan ilmiah yang membahas substansi Naskah Akademik yang diikuti banyak peserta dan mereka yang ahli di bidangnya untuk memperoleh pandangan mengenai substansi Naskah Akademik.

5. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan melalui tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

BAB I

Pendahuluan

A Latar Belakang

Latar belakang memuat **pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik** sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu.

B Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C Maksud Dan Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

D Metode

Metode yang dapat digunakan, yaitu : 1) **Metode yuridis normatif** dilakukan melalui studi pustaka yang **menelaah data sekunder** yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya. 2) **Metode yuridis empiris** diawali dengan penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dilanjutkan dengan **observasi serta penyebaran kuesioner** untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

BAB II **Kajian Teoretis dan Praktik Empiris**

A **Kajian Teoritis**

Presentasikan teori-teori yang relevan dengan kebijakan yang diusulkan.

B **Kajian Terhadap Asas/Prinsip**

1. Asas Hukum: Tinjauan terhadap asas-asas hukum yang relevan dengan kebijakan.
2. Prinsip-Prinsip Kebijakan: Analisis terhadap prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan.

C **Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi**

1. Praktik Penyelenggaraan: Deskripsi praktik penyelenggaraan yang ada saat ini.
2. Kondisi yang Ada: Analisis kondisi aktual di lapangan.
3. Permasalahan yang Dihadapi: Identifikasi masalah-masalah yang muncul dalam praktik penyelenggaraan.

D **Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan**

1. Implikasi Hukum: Analisis implikasi hukum dari pengaturan yang diusulkan.
2. Implikasi Sosial dan Ekonomi: Analisis dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan.

BAB III **Evaluasi Dan Analisis Peraturan Peruu Terkait**

Bab ini memuat hasil dari tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan yang diusulkan; identifikasi kesenjangan dan kelemahan dalam peraturan yang ada; serta ekomendasi perbaikan peraturan berdasarkan evaluasi dan analisis.

A) Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa **peraturan** yang **dibentuk** mempertimbangkan **pandangan hidup**, **kesadaran**, dan **cita hukum** yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk **memenuhi kebutuhan masyarakat** dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut **fakta empiris** mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C) Landasan Yuridis

Landasan yuridis menyangkut **persoalan hukum** yang berkaitan dengan **substansi atau materi** yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

A) Jangkauan Pengaturan

1. Cakupan Geografis: Jelaskan jangkauan geografis dari kebijakan.
2. Kelompok Sasaran: Identifikasi kelompok sasaran yang akan terkena dampak kebijakan.

B) Arah Pengaturan

1. Tujuan Pengaturan: Jelaskan arah pengaturan yang ingin dicapai melalui kebijakan.
2. Strategi Implementasi: Deskripsikan strategi yang akan digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan.

C) Ruang Lingkup Materi

1. Isi Kebijakan: Jelaskan materi pokok dari kebijakan yang diusulkan.
2. Pembatasan dan Ketentuan: Jelaskan batasan dan ketentuan yang relevan.

BAB IV Penutup

A) Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B) Saran

1. Saran Kebijakan: Saran untuk kebijakan yang akan diambil.
2. Langkah Tindak Lanjut: Rekomendasi untuk langkah-langkah tindak lanjut yang perlu diambil.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundangundangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

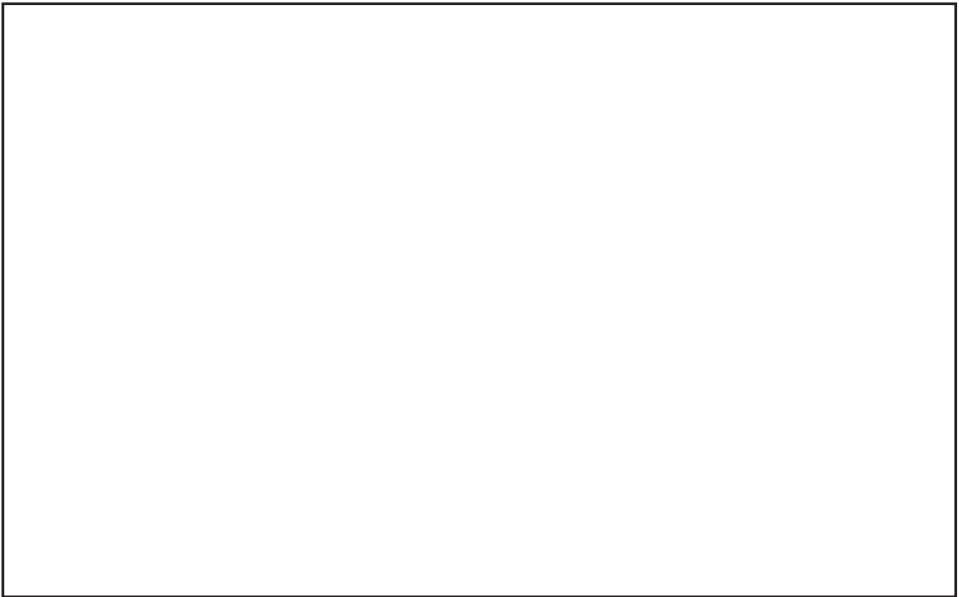
Lampiran

Lampiran yang berisi rancangan peraturan daerah atau dokumen pendukung lainnya.

Untuk lebih jelasnya mari kita simak video penjelasan **Naskah Akademik Kebijakan Publik** dengan scan QR CODE di samping atau dengan klik video di bawah ini!



SCAN ME



PROJECT

Setelah mengetahui sistematika naskah akademik kebijakan publik, silahkan buat rumusan naskah akademik kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 37,57. <http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Dwiyowiyoto, R. N. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi. Elex Media Komputindo.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). The new public service: Serving, not steering. Armonk, NY: ME Sharpe.
- Intan Fitri Meutia. (2017). Analisis Kebijakan Publik. Bandar Lampung :Aura.
- Suharto, Edi. 2010, Analisis Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta
- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- <https://an-nur.ac.id/blog/apa-perbedaan-antara-kebijakan-dan-keputusan.html>
- https://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-....pdf
- <https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2020/06/subject-33-5ecca96e7d35c5.55741092.pdf>

AUTOBIOGRAFI

Hary Priyanto



Lahir di Banyuwangi pada 20 September 1979. Gelar Sarjana Teknik (S.T) disematkan tahun 2004 setelah menyelesaikan pendidikan pada program studi Teknik Sipil di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, gelar Magister Sains (M.Si) disematkan tahun 2014 setelah menyelesaikan pendidikan pada program studi Magister Ilmu Administrasi di Universitas Jember, dan gelar Doktor (Dr) disematkan tahun 2022 setelah menyelesaikan pendidikan pada program studi Doktor Ilmu Administrasi di Universitas Jember.

Romo dari Semilir Angin Nusantara dan Gemicik Air Bening Indonesia ini merupakan purna Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC Gmni) Banyuwangi (2004-2006), yang saat ini sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC PA Gmni) Banyuwangi (2022-2027), merupakan founder lembaga riset dan konsultan politik: Rajut Analisa Publik dan Demokrasi Perdamaian (RAP-DP), dan founder media: RESPONSIF.id.

Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (2016-2019), sebagai Kepala Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan (PuSPaKa) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (2016-2018), serta sebagai Sekretaris Senat Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (2022-2026), ini merupakan purna komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi (2003-2009 dan 2009-2014), dan sebagai Fasilitator Kementerian Agama Republik Indonesia untuk Program Kerja Evaluasi Diri Madrasah dan Rencana Kerja

dan Anggaran Madrasah (EDM-RKAM) (2020) serta Asesor untuk Program Bantuan Kinerja dan Afirmasi (BKBA) (2022) Area Kerja Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

Lelaki yang dikenal dengan sebutan Hary Pr ini Mitra Bestari pada Jurnal Kebijakan Pembangunan (JKP) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan (2021-2024), dan Staff Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banyuwangi (2022-2024).

Novelis Elegi Angin Pagi (2009) dan Trilogi Gandrung Kemiren (2021) ini merupakan pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Jember (2020-2024), Pembina Racana Wilwatikta Pramuka Gajah Mada-Tribuana Tunggaladewi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (2017-2024), pengurus Kwartir Cabang Pramuka Banyuwangi (2021-2026), dan tercatat anggota International Association of Researchers in The Filds of Economic, Social and Technology (2022).

Penerima Lencana PANCAWARSA I (2019), Lencana PANCAWARSA II (2024) dan pernah dinobatkan sebagai Analis Politik Muda Banyuwangi dalam Sunrise of Java Award Jawa Pos-Radar Banyuwangi (2023) ini dapat dihubungi melalui: harysangabi@gmail.com.

